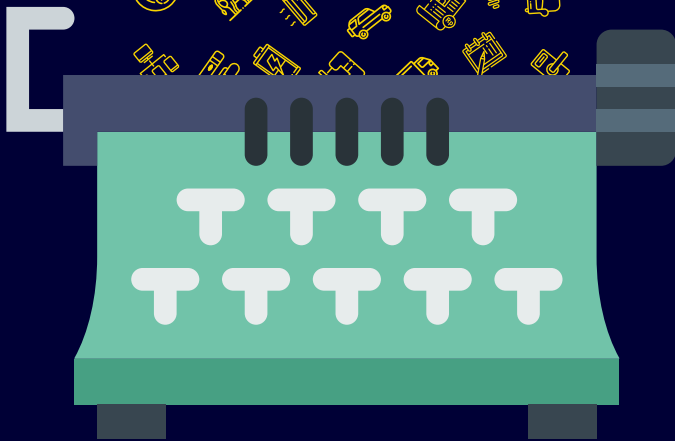
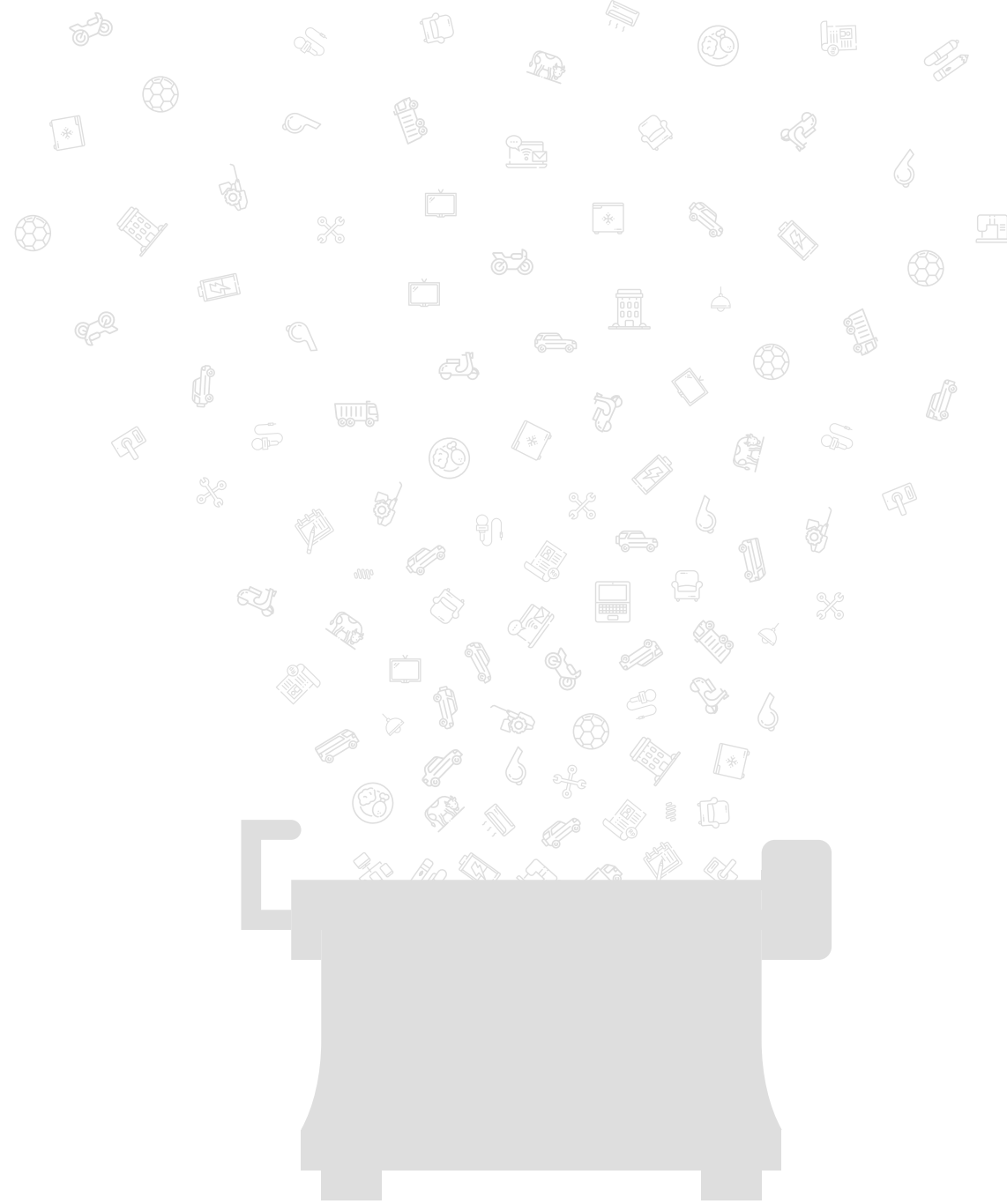


# Investigasi Lelang Opentender Pemerintah





*Diterbitkan oleh ICW*

*Koordinator ICW*  
**Adnan Topan Husodo**

*Divisi Kampanye Publik ICW*  
**Siti Juliantari**  
**Christian Evert**  
**Dewi Anggraeni**  
**Sigit Wijaya**  
**Asri Tri Undari**

*Tim Mentor & Editor*  
**Anton Aprianto**  
**Jajang Jamaludin**  
**Mustafa Silalahi**

*Jurnalis Penerima Beasiswa*  
**Seplin Bachrir**  
**Aqilah Nurul Khaerani Latif**  
**Muhammad Yunus**  
**Jeane Bernetje Rondonuwu**

*Desain sampul & Layout*  
**Sigit Wijaya**

*Lisensi Icon*  
**Flaticon.com**

*Jl. Kalibata Timur IVD*  
*No.6, RT.10/RW.8 ·*  
*+62 21 7901885*  
*email: icw@antikorupsi.org*

*Daftar Isi*

<b>4</b>	<b>Kata Pengantara</b>	<b>22</b>	<b>Jauh Sasaran Sapi Gaduhan</b>
<b>8</b>	<b>Catatan Mentor</b>	<b>30</b>	<b>Gelap Bantuan Traktor Tangan</b>
<b>10</b>	<b>Sunat Dana Proyek Olahraga</b>	<b>40</b>	<b>Main Mata Tender Bus Eksekutif</b>
<b>17</b>	<b>Bintang Proyek Berkantor Ruko</b>	<b>50</b>	<b>Berawal dari Material Bangunan</b>
		<b>54</b>	<b>Profil Fellowship</b>

## Opentender.net, Instrumen Peningkatan Kontrol Publik Berbasis Teknologi

Secara umum diyakini bahwa untuk mengurangi korupsi, sebuah negara perlu mengadopsi penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dan menyediakan layanan publiknya kepada masyarakat. Kini, pendekatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi di berbagai belahan dunia telah begitu populer. Pesatnya pertumbuhan industri teknologi informasi turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan penerapan IT pada sektor publik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai bagian penting dari gerakan antikorupsi di Indonesia menyadari adanya potensi dalam penerapan IT untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Salah satu yang diinisiasi oleh ICW adalah penyediaan alat pengawasan untuk sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik bernama opentender.net. Instrumen berbasis web ini gunanya untuk mengidentifikasi potensi kecurangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah dilakukan melalui lelang elektronik.

Dengan mengetahui adanya potensi fraud, maka publik bisa melakukan pressure kepada pemerintah secara lebih memadai, karena ditopang oleh kekuatan informasi dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam mengembangkan instrumen ini, ICW mendapatkan sokongan penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(LKPP), yang merupakan lembaga otonom dibawah Presiden. Salah satu dukungan yang sangat signifikan adalah penyediaan data seluruh lelang elektronik yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang bersumber dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia. Data itu kemudian diolah dalam mesin opentender.net untuk menghasilkan lima informasi mendasar yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya potensi fraud dalam setiap pengadaan.

Harus diakui bahwa setiap instrumen pengawasan yang bersumber dari masyarakat, hidup dan matinya ada di tangan masyarakat itu sendiri. Jika tidak ada satupun, atau hanya segelintir orang yang mengerti dan menggunakan instrumen pengawasan tertentu yang telah tersedia, maka kontrol publik juga menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, ICW bekerjasama dengan berbagai pihak, khususnya pada sektor masyarakat sipil seperti CSO di berbagai daerah dan jurnalis untuk dapat menggunakan opentender.net melalui kegiatan fellowship.

Atas dukungan MAVC-HIVOS, kegiatan fellowship yang menasar para jurnalis di daerah telah dilaksanakan. Peserta fellowship diajak mengenal opentender.net dalam satu sesi pelatihan khusus dan kemudian diminta untuk menggunakan tool ini dalam melakukan kerja investigasi. Hasilnya cukup memuaskan karena banyak potensi pelanggaran dalam pengadaan sektor publik di daerah sampel program ditemukan, meski proyek pengadaan itu telah dilakukan secara elektronik.

Dengan menggunakan opentender.net, jurnalis peserta fellowship lebih mudah mengidentifikasi jenis proyek pengadaan yang akan dipilih untuk dijadikan objek penelusuran. Hal berikutnya yang perlu dilakukan oleh para jurnalis adalah melakukan pencarian dokumen tambahan, seperti kontrak, tanda daftar perusahaan, akte pendirian perusahaan, spesifikasi proyek, harga pembanding yang tersedia di pasaran, dan penelusuran lapangan untuk mengetahui kebenaran atas berbagai informasi yang ada, seperti alamat perusahaan, nama perusahaan yang ikut tender, pemilik atau pengendali perusahaan dan lain sebagainya.

Dari penggunaan opentender.net yang dikembangkan melalui kerja-kerja investigasi jurnalistik, setidaknya kita bisa memberikan gambaran yang lebih akurat bahwa penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran sektor publik tidak secara otomatis membuat tata kelola

menjadi lebih baik. Artinya, asumsi bahwa intervensi teknologi pada sektor publik dapat meningkatkan kualitas good governance dan mengurangi korupsi bukanlah sesuatu yang tanpa prasyarat.

Mengacu pada temuan dari kerja investigasi peserta fellowship, ada beberapa modus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak berubah meskipun sudah menggunakan mekanisme tender elektronik. Diantaranya adalah, pertama, adanya indikasi lelang arisan dimana jumlah peserta lelang mencukupi untuk tidak disebut sebagai monopoli, akan tetapi pada tahap akhir proses lelang, sebagian besar dari mereka tidak mengajukan harga penawaran. Terdapat indikasi peserta lelang dikondisikan untuk mundur teratur sehingga pada tahap akhir lelang, yang akan muncul sebagai pemenang adalah perusahaan yang telah sedari awal ditentukan dipilih.

Kedua, berbagai perusahaan yang mengikuti lelang elektronik pada satu proyek dikendalikan oleh satu orang. Banyaknya peserta lelang yang mendaftar hanyalah formalitas belaka karena pengendali atau pemiliknya ada pada satu tangan. Untuk mengendalikan berbagai perusahaan itu, pengusaha dapat meminjam perusahaan milik orang lain dengan biaya tertentu yang dibayarkan di muka.

Ketiga, beberapa perusahaan yang mengikuti lelang tidak jelas alamatnya. Meskipun dalam dokumen lelang disebutkan adanya alamat resmi dari perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang, namun ketika ditelusuri ke lapangan, acapkali alamat tersebut tidak ditemukan. Kadangkala alamat itu hanyalah rumah pribadi, atau ruko yang aktivitasnya berbeda dengan apa yang dituangkan dalam dokumen lelang.

Dari hasil investigasi para jurnalis peserta fellowship, 'permainan' lelang secara elektronik dapat ditemukan dengan gampang. Temuan mereka itu sekaligus mengkonfirmasi validitas dari instrument opentender.net yang telah dibuat oleh ICW dalam rangka membantu masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja pemerintah, khususnya di sektor belanja publik. Selain jurnalis, kalangan CSO di daerah, kelompok mahasiswa, peneliti dan masyarakat umum merupakan aktor yang dapat menggunakan tool opentender.net untuk memulai kerja pengawasan karena mudahnya penggunaan tool ini.

Semoga karya para jurnalis peserta fellowship opentender.net dapat menginspirasi kalangan jurnalis secara lebih luas untuk memanfaatkan website opentender.net dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik mereka. Tentu tak ada gading yang tak retak. Hasil atau karya investigasi peserta fellowship sebenarnya dapat lebih dipertajam dengan berbagai bukti dan dokumen lainnya, namun karena alokasi waktu yang tersedia, serta dukungan anggaran yang tidak terlalu besar, maka kerja investigasi para peserta fellowship pada akhirnya harus dibatasi oleh kedua hal itu.

Kalibata, 23 September 2017

Adnan Topan Husodo  
Koordinator ICW

## Komitmen, Keuletan, dan Komunikasi

Komitmen merupakan modal utama bagi seorang jurnalis yang hendak menulis artikel laporan mendalam, terlebih lagi laporan investigasi. Penggalan bahan kedua jenis artikel ini jauh berbeda dari artikel berita lempang (straight news) yang kadang cukup dengan mendengarkan pernyataan narasumber. Menulis laporan mendalam dan investigatif butuh kerja lebih ekstra.

Enam jurnalis yang lolos dalam seleksi proposal fellowship Indonesia Corruption Watch 2017 sejatinya punya kesempatan berharga untuk menguji dan mengasah kemampuan mereka dalam meliput dan menulis laporan mendalam atau investigatif.

Untuk ide liputan, melalui situs [www.opentender.net](http://www.opentender.net), ICW telah memasok informasi tentang proyek pemerintah yang terindikasi menyimpang. Lalu, melalui pelatihan dan mentoring, mereka juga menerima transfer pengetahuan serta keterampilan dari pegiat antikorupsi, auditor pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan jurnalis yang berpengalaman melakukan liputan investigasi.

Patut disayangkan, dua fellow tak bisa dipegang komitmennya sampai akhir. Hingga batas waktu yang ditentukan, hampir empat bulan, keduanya tak kunjung menyelesaikan artikel sesuai janji awal. Perilaku keduanya menjadi catatan serius bagi panitia dan mentor fellowship ini. Untung saja, dengan segala keterbatasan dan hambatannya, empat peserta lain berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Mereka juga membuat laporan menarik yang bisa menggambarkan bagaimana permainan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah. Demi perbaikan penyelenggaraan fellowship berikutnya, kami perlu menyampaikan catatan berikut ini.

Pertama, berkaitan dengan proses penyaringan peserta. Penyaringan proposal harus lebih ketat untuk memilih fellow terbaik. Usulan peliputan harus dievaluasi secara komprehensif oleh para mentor serta ahli dari ICW. Proposal liputan tak hanya harus penting dan menarik, tapi juga terjangkau dari segi perolehan bahan, kemampuan kandidat, serta tenggat program. Karena itu, penguasaan bahan atau data awal liputan perlu menjadi pertimbangan utama dalam proses penyaringan. Kedua, berkaitan dengan kriteria calon fellow. Perlu ada pertimbangan khusus untuk mengutamakan jurnalis muda yang punya passion, keberanian, serta keuletan dalam menjangkau bahan. Meski jam terbang jurnalistiknya bisa jadi belum tinggi, jurnalis muda umumnya lebih kuat keinginan belajarnya ketimbang jurnalis yang telah merasa “mapan”. Pertimbangan ini juga penting agar fellowship seperti ini menjangkau jurnalis muda berbakat yang masih punya banyak kesempatan untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilannya dalam liputan mendalam atau investigatif.

Ketiga, berkaitan dengan komunikasi selama proses mentoring. Liputan mendalam dan investigatif biasanya digarap dalam team work, dengan pengeditan laporan yang berlapis. Karena itu, setiap fellow harus menjaga kelancaran komunikasi dengan anggota tim, atasan, serta para mentor. Memang, reporter (fellow) merupakan orang yang paling tahu kondisi di lapangan. Namun, dia tetap perlu tempat berdiskusi ketika menemukan ide atau informasi baru, terlebih lagi ketika menghadapi kesulitan di lapangan. Redaktur atau mentor, di samping sebagai “konsultan”, bisa juga berperan sebagai “sparing partner” atau bahkan “devil advocate” untuk si reporter.

Terakhir, kami melihat banyak pelajaran penting yang bisa diambil dari program fellowship ini—baik oleh peserta, mentor, maupun panitia secara keseluruhan. Kami, tentu saja terbuka atas umpan balik dari siapapun yang peduli atas perbaikan praktek jurnalisisme serta pemberantasan korupsi di negeri ini.

### Tim Mentor

**Anton Aprianto**  
**Jajang Jamaludin**  
**Mustafa Silalahi**

Sulawesi Tenggara

# Sunat Dana Proyek Olahraga

*Jatah makanan dan minuman atlet selama Pemusatan Latihan Daerah untuk Pekan Olahraga Nasional 2016 di Kendari diduga disunat di sana-sini. Modusnya mulai dari mengurangi jatah sampai memangkas jumlah hari pelaksanaan. Pemenang tender diduga memiliki kedekatan dengan panitia.*

Foto Ilustrasi

RUMAH toko dua lantai berkelir abu-abu di Jalan MT Haryono Nomor 143, Kendari, Sulawesi Tenggara, itu kini menjadi Apotek Kimia Farma. Semenjak September 2016, apotek tersebut mulai beroperasi di ruko dua lantai yang terbilang sederhana tersebut. Sebelum berubah menjadi Apotek Kimia Farma, menurut portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, ruko itu tercatat sebagai kantor CV Bintang Griyatama. Saat ini perusahaan tersebut tercatat pindah ke sebuah rumah makan di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Kendati berkantor di tempat-tempat sederhana, perusahaan ini terbilang mentereng. Berdasarkan catatan portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sejak 2012 perusahaan yang dipimpin Erwin Riswanto ini memenangkan belasan tender proyek yang dilelang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Nilai proyeknya ada yang mencapai belasan miliar rupiah.

Salah satu proyek yang tendernya dimenangkan perusahaan ini adalah pengadaan makan dan minum selama Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Pekan Olahraga Nasional 2016. Proyek ini diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Sulawesi Tenggara. Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik

provinsi itu menyebutkan proyek ini dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tenggara senilai Rp 2,2 miliar. Dari jumlah itu, anggaran Rp 468 juta untuk kebutuhan makanan ringan dan Rp 1,7 miliar untuk makan dan minum.

Direktur Utama CV Bintang Griyatama Erwin Riswanto membenarkan perusahaannya yang menggarap proyek tersebut. "Kami memenangkan proyek ini karena punya pengalaman," ujar Erwin, "Kami sebelumnya melayani pengadaan kue di kantor gubernur, DPRD, dan kepolisian daerah." Selain berbisnis di bidang jasa pelayanan dan pengadaan makanan dan minuman, perusahaan ini juga bergerak, antara lain, di bidang pengadaan alat tulis kantor, elektronik, kendaraan bermotor, komputer, percetakan, dan pertambangan. Pengadaan makan dan minum itu diperuntukkan untuk atlet, pelatih, tenaga mekanik, dan satuan tugas selama pemusatan pelatihan dilakukan. Menurut Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tenggara Nomor 160 Tahun 2016, jumlah atlet ketika itu 69 orang, pelatih 21 orang, dan tenaga mekanik ada 3 orang.

Khusus untuk satuan tugas, jumlah personilnya berbeda-beda. Menurut berita acara hasil verifikasi cabang olahraga menuju PON XIX di Jawa Barat 2016 yang ditetapkan 16 Februari 2016, jumlah satuan tugas hanya 30 orang. Sedangkan menurut Surat Keputusan Ketua Umum KONI yang diteken sebulan kemudian, jumlahnya membengkak menjadi 51 orang.

Ketika lelang proyek itu digelar, seperti terekam dalam portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, ada 12 perusahaan yang mendaftar untuk bersaing memenangkan tender proyek tersebut. Tapi sampai batas yang ditentukan, dari 12 pendaftar, hanya CV Bintang Griyatama yang mengajukan penawaran.

Sempat ada tudingan proyek itu sejak awal memang bakal dimenangkan CV Bintang Griyatama. Tapi Erwin Riswanto menyanggah tuduhan tersebut. Menurut dia, tidak ada yang aneh dari proses lelang proyek itu. Erwin mengklaim perusahaannya menang karena memiliki peralatan yang lengkap dan dianggap sarat pengalaman. "Kami punya dapur yang luas dan bisnis kami memang di sini," ujarnya.

Belakangan setelah pemusatan latihan, proyek ini justru menyisakan masalah. Dalam sistem rencana umum pengadaan, proyek makan dan minum selama pelatda dimulai 14 Juni 2016 sampai 15 September 2016 atau berdurasi selama 94 hari. Akan tetapi dari dokumen yang diperoleh reporter media Rakyat Sultra, KONI Sulawesi Tenggara cuma melaksanakan pelatda mulai 14 Juni sampai 14 September 2016 atau 93 hari. Itu artinya ada selisih satu hari antara rencana umum pengadaan dengan pelaksanaan pelatda.

Selisih satu hari ini yang diduga menjadi salah modus penggangsiran duit proyek tersebut. Bukan hanya soal selisih satu hari tersebut, ada dugaan modus lain untuk menilap duit proyek ini. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah makanan para atlet.

Ini misalnya terjadi pada pembukaan pelatda yang secara kebetulan bertepatan dengan sembilan hari bulan suci Ramadan 1437 Hijriah. Tercatat ada 22 hari pelaksanaan puasa ketika pelatda digelar. Ketika pembukaan pelatda berlangsung, atlet dan pelatih hanya disugahi satu kali makan dan satu kali makanan ringan. Sementara menurut jadwal, seharusnya terdapat tiga kali makan dan dua kali suguhan makanan ringan (*snack*). Pelatih silat, Alimin, mengalami

kejadian pengurangan jatah makan bagi timnya. Ketika Ramadan, Alimi mengatakan hanya mendapat jatah satu kali makan dan satu kali *snack*. "Ada dua pelatih dan empat orang atlet yang mendapat jatah seperti itu," katanya.

Pelatih cabang olahraga sepak takraw, Heriansyah, juga mengeluhkan hal yang sama. Ia menyayangkan pengurangan jatah makan kepada timnya yang dilakukan secara sepihak. "Sampai sekarang tidak ada uang pengganti kekurangan itu," katanya. Dugaan duit proyek itu disunat terjadi juga untuk beberapa cabang olahraga yang melakukan uji coba (*try out*) atau pindah latihan di luar daerah. Selama pelatda berlangsung, memang ada beberapa cabang olahraga yang pindah latihan di luar daerah guna mematangkan persiapan menghadapi PON Jawa Barat. Cabang olahraga yang melakukan uji coba di luar daerah adalah catur, menembak, biliar, bulu tangkis, dayung dan sepeda motor.

Karena uji coba di luar daerah, maka anggaran konsumsi di antara cabang olahraga tersebut dicairkan dalam bentuk uang. Pencairan uang konsumsi tersebut yang diduga disunat. Ketika itu, uang tersebut diterima beberapa pelatih cabang olahraga dari Wakil Bendahara I KONI



**Pengadaan Makan dan Minum Atlet**  
**Rp 2,2 M**  
 Rp 468 juta untuk kebutuhan makanan ringan dan Rp 1,7 miliar untuk makan dan minum.

**Atlet 69 orang**  
**Pelatih 21 orang**  
**Tim Mekanik 3 orang**  
**Satuan Tugas 30/51 orang**

Khusus untuk satuan tugas, jumlah personilnya berbeda-beda. Menurut berita acara hasil verifikasi cabang olahraga menuju PON XIX di Jawa Barat 2016 yang ditetapkan 16 Februari 2016, jumlah satuan tugas hanya 30 orang. Sedangkan menurut Surat Keputusan Ketua Umum KONI yang diteken sebulan kemudian, jumlahnya membengkak menjadi 51 orang.

Sultra Kasman. Nah, ketika dana dicairkan, mulailah terjadi dugaan ketidaksesuaian.

Dugaan ketidaksesuaian uang makan itu dialami pelatih cabang olahraga biliar Najib Husen. Dalam dokumen pengajuan pengalihan anggaran, Najib meminta supaya anggaran konsumsi diberikan selama 50 hari. Namun, Kasman cuma memberi uang konsumsi selama 45 hari. Sementara lima harinya sama sekali tidak ia

terima. Di cabang olahraga biliar, ada dua atlet dan satu pelatih yang tercatat sebagai peserta pelatda. “Itu untuk dua atlet dan satu pelatih,” katanya.

Wakil Bendahara I KONI Sultra Kasman membenarkan hanya memberi uang konsumsi selama 45 hari untuk cabang olahraga biliar. “Kenapa hanya dikasi sekian? Karena itu kebijakan. Bukan saya (yang tetapkan). Itu kebijakan Wakil Ketua

Umum III Eryckson Ludji. Saya kan bendahara dan tahunya membayar,” katanya.

Eryckson Ludji yang merupakan wakil ketua yang membidangi keuangan belum berkomentar terkait pernyataan Kasman. Awalnya ia bersedia dihubungi reporter media Rakyat Sultra, namun ia langsung menutup teleponnya saat ditanya soal pengadaan makan dan minum selama pelatda untuk PON Jawa Barat. Sebelumnya kepada sejumlah media lokal, Eryckson mengaku mengenal dekat Erwin Riswantyo, pemilih perusahaan pemenang tender itu.

“Kalau dekat, semua orang di Kendari dekat dengan saya,” katanya. Adapun Erwin tak membantah mengenal dekat Eryckson. Tapi dia menyanggah kalau ia memenangkan proyek itu karena praktek curang karena bermain mata dengan Eryckson. “Kalau ada proyek serupa seperti ini lagi, saya tidak mau ambil. Potong leher saya. Ini setengah mati untungna,” kata Erwin.

**Seplin Bachrir**

\*\*\*

Tahun: 2015		Data eProc 2016	
Kategori: Jawa	Sumber Data: Semua	E Proyek: Rp. 21.833.218.000	E Skor: 54
Entitas: Semua	LPSE: LPSE Provinsi Sulawesi Tengah	E Page: Rp. 29.457.752.000	E Kontrak Page: 62 %
		E HPS: Rp. 20.139.949.978	E Kontrak HPS: 88 %
		E Kontrak: Rp. 892.419.000	E LPSE: 1
		E Page: Rp. 829.897.818	E Agen: 2
		E HPS: Rp. 819.492.272	E SKPD: 12
		E Kontrak: Rp. 819.492.272	E Penyedia: 21

10 Proyek eProc 2016							Potensi Realisasi	
NO. PROJEK	PENYEDIA	KATEGORI	PENGUMUMAN	NILAI KONTRAK	IMD	HPS	KH	SKOR
1. Cleaning Service Kantor Gubernur Sultra	CV PUTRI MONAPA	Jawa Tengah	18 Dec 2015	1.712.890.000	1.800.000.000	1.723.205.000	88%	18
2. MAKAN DAN MINUM PELATDA PON XIX 2016	CV BINTANG GRIKATAMA	Jawa Tengah	20 Apr 2016	2.205.545.000	2.223.000.000	2.223.800.000	99%	18
3. Penyediaan tenaga pengabdian keahlianan dan keterampilan	CV PUTRI BIANKA	Jawa Tengah	1 Feb 2016	3.344.173.000	3.045.000.000	3.045.900.000	100%	15
4. Sewa alat berat untuk keperluan	BARTERA SUDIRN JAHIR PERWASA-JAWARTA	Jawa Tengah	13 Apr 2016	1.895.250.000	1.900.000.000	1.900.800.000	100%	15
5. Opsi Sial Ujan	CV Makmur Printing	Jawa Tengah	4 Apr 2016	1.743.582.800	1.750.200.000	1.748.896.000	100%	15
6. Base Cleaning Service	CV Nela Nela	Jawa Tengah	3 Feb 2016	1.400.296.000	1.700.000.000	1.416.306.000	89%	15
7. Cleaning Service Halaman Kantor Gubernur	Sira Mandiri	Jawa Tengah	18 Dec 2015	867.300.000	694.000.000	679.800.000	88%	15
8. Mengubah Tombol Angkutan Besi (150 KK x 42,5 Kg x 10 Bt)	CV FARGANI PRATAMA	Jawa Tengah	7 Mei 2016	210.475.000	235.875.000	235.875.000	98%	15
9. Cleaning Service Masjid Agung Al-Kautsar Kendari	CV YUVI	Jawa Tengah	18 Dec 2015	524.880.000	540.000.000	638.800.000	87%	15
10. Penyusunan Data Base Infrastruktur KAPU-an Prov. Sulawesi Tenggara (Pm Dokumentasi)	CV DODOL MANAGEMENT	Jawa Tengah	29 Jul 2016	500.798.000	1.000.000.000	515.798.000	87%	15

10 Besar Pengadaan paling beresiko di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2015



Sulawesi Tenggara

# Bintang Proyek Berkantor Ruko

*Lokasi yang diduga kantor  
CV Bintang Griyatama*

HANYA dalam waktu empat tahun, CV Bintang Griyatama sudah menjadi rekanan strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama kurun waktu itu, menurut portal opentender.net yang digagas Indonesia Corruption Watch, perusahaan ini memenangkan lelang sebelas proyek yang terbilang besar di daerah tersebut.

Dari jumlah tersebut, sepuluh proyek berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun satu proyek lainnya merupakan milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Nilai satu proyek bisa mencapai miliaran rupiah.

Salah satunya adalah proyek pengadaan makan dan minum selama Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Pekan Olahraga Nasional 2016. Proyek ini diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Sulawesi Tenggara. Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik provinsi itu menyebutkan proyek ini dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tenggara senilai Rp 2,2 miliar.

Saat lelang, proyek pengadaan makan dan minum pelatda diminati 12 perusahaan termasuk CV Bintang Griyatama. Tapi, dari 12 perusahaan, hanya CV Bintang Griyatama yang

mengajukan penawaran. Sementara 11 perusahaan lain hanya ikut mendaftar tetapi tidak mengajukan penawaran. Indikasi 11 perusahaan ini tidak meyodorkan penawaran terekam dalam portal LPSE Provinsi Sultra. Proyek lainnya CV Bintang Griyatama terdiri dari delapan pekerjaan konstruksi dan minum atlet, dan satu pengadaan barang.

Menurut dokumen pendirian CV Bintang Griyatama, perusahaan ini didirikan dengan akta nomor 29 tertanggal 9 Februari 2011. Pendiri adalah Erwin Riswanto, Mus, dan Beppy Siahaya yang tak lain istri Erwin Riswanto. Di akta nomor 29 itu, Erwin Riswanto tercatat sebagai direktur utama, Mus sebagai direktur dan Beppy Siahaya sebagai pesero komanditer atau peserta pasif. Di dokumen itu juga menyebutkan delapan bidang usaha yang dikerjakan CV Bintang Griyatama. Delapan bidang itu adalah perdagangan umum, pembangunan, industri, jasa, percetakan, pertanian, pengangkutan, dan pertambangan. Di bidang perdagangan umum, usaha yang dikerjakan CV Bintang Griyatama di antaranya alat komputer, network elemen, alat tulis kantor, elektrikal, komputerisasi, mekanikal, kendaraan bermotor, tekstil, makanan dan minuman.

Setelah didirikan 9 Februari 2011, CV Bintang Griyatama mengalami perubahan anggaran dasar perseroan komanditer dengan akta nomor 36 tertanggal 27 Februari 2012. Dalam perubahan tersebut, posisi Beppy Siahaya sebagai pesero komanditer digantikan oleh Muhammad Basry. Di akta itu juga tercatat kalau istri Erwin Riswanto keluar dari perusahaan.

Dalam dokumen perubahan tersebut, CV Bintang Griyatama dinyatakan berkedudukan dan berkantor di Jalan MT Haryono Nomor 143 Kota Kendari. Dari penelusuran reporter Media Rakyat Sultra, ada tiga rumah toko yang memiliki nomor 143 di Jalan MT Haryono. Ruko pertama toko Istana Listrik. Di samping toko mencantumkan nomor 143. Namun, ruko itu merupakan kantor PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Kendari. Perusahaan itu bergerak dalam bidang usaha pengelolaan tenaga kerja.

Kedua ruko ini berada di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari. Ada dokumen lain yang menyebutkan kalau Erwin pernah bermukim di Jalan MT Haryono Nomor 143 di Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu. Saat ini ruko yang pernah ditempati Erwin itu disewa oleh Kimia Farma.

Kerapnya perusahaan ini mendapat tender besar dari provinsi Sulawesi Tenggara tak bisa lepas dari peran Erwin. Di kalangan pengusaha, Erwin memiliki jaringan kuat ke sejumlah pejabat pemerintah daerah. Ia misalnya kenal dengan Wakil Ketua III KONI Sultra Eryckson Ludji yang mengurus tentang keuangan organisasi ini. Eryckson Ludji bahkan pernah menghadiri perayaan ulang tahun Beppy Siahaya yang juga bekas pendiri CV Bintang Griyatama. Kehadiran Wakil Ketua III KONI Sultra itu dalam perayaan hari ulang tahun istri Erwin Riswanto itu terlihat dalam foto yang diunggah Eryckson Ludji dalam akun facebook-nya pada 12 Mei 2017.

Eryckson mengaku kenal dengan Erwin Riswanto. Terkait ucapan ulang tahun yang ia berikan kepada bekas pendiri CV Bintang Griyatama juga direspons Eryckson Ludji. "Itu terlalu pribadi. Tidak ada tugasnya wartawan ke sana," ungkapnya melalui sambungan telepon 7 Juni 2017, "Kalau dekat, semua orang di Kendari saya dekat."

Erwin Riswanto mengatakan bukan hanya Eryckson Ludji yang dia kenal di KONI Sulawesi Tenggara. Ia menyebutkan nama beberapa

pengurus lainnya yang juga ia kenal. “Orang di sini bukan hanya Eryckson yang kita kenal. Tasman Taewa (Wakil Ketua I KONI) kita kenal, (Plt Sekretaris KONI) Elvis Basri Uno kita kenal, pak (Ketua KONI) Lukman juga kita kenal,” katanya.

Meski mengenal beberapa pengurus KONI Sulawesi Tenggara, namun Erwin memastikan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam

proyek yang berhubungan dengan lembaga itu seperti pengadaan makanan dan minuman atlet. “Tidak ada KKN (dalam proyek) ini,” tegasnya. Erwin juga mengatakan tidak ada hubungan antara ucapan ulang tahun Beppy Siahaya dari Eryckson Ludji dengan keberhasilannya memenangkan tender proyek pengadaan makanan dan minuman. “Kok dihubungkan ke situ,” jelasnya.

\*\*\*

CV. BINTANG GRIYATAMA									
DATA e-PROC : PENYEDIA									
Direktur: ERWIN RISWANTYO									
Direktur: MUS									
Σ Kontrak	Rp. 11.893.394.000	Σ HPS	Rp. 12.020.503.000						
̄ Kontrak	Rp. 991.116.167	̄ HPS	Rp. 1.001.708.583						
̄ Kontrak:HPS	98 %	̄ Pagu	Rp. 1.036.916.667						
Σ Paket	12 Paket	Σ Pagu	Rp. 12.443.000.000						
̄ Triwulan	ke-2	NPWP	03.107.124.4-811.000						
		Tahun	Semua 2017 2016 2015 2014 2013 2012						
Halaman 1/2									
NO.	NAMA PAKET	LPSE	KATEGORI	PENGUMUMAN	NILAI KONTRAK	PAGU	HPS	KONTRAK HPS	SKOR
1.	Belanja Modal Pengadaan&Inst. Konstruksi/Pemeliharaan Gedung Kantor Rehabilitasi Ruang Pina Kantor Gubernur (Intensiv)	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Pekerjaan Konstruksi	3 Nov 2012	2.376.000.000	2.405.000.000	2.400.000.000	99%	18
2.	MAKAN DAN MINUM PELATDA PON XX 2016	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Jasa Lainnya	20 Apr 2016	2.209.545.000	2.223.000.000	2.223.000.000	98%	18
3.	Belanja Modal Pengadaan Intakus / Proyektor	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengadaan Barang	13 May 2016	1.596.596.000	1.600.000.000	1.596.000.000	100%	17
4.	Pekerjaan Interior Kantor DPRD	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Pekerjaan Konstruksi	21 Apr 2017	1.381.425.000	1.400.000.000	1.400.000.000	99%	17
5.	Pemancangan Platfond GRC Gedung Induk (Luar)	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Pekerjaan Konstruksi	27 Sep 2013	1.213.818.000	1.400.000.000	1.238.800.000	88%	18
6.	Pemancangan Platfond GRC Gedung Induk Dalam	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Pekerjaan Konstruksi	18 Apr 2014	903.820.000	1.000.000.000	915.775.000	99%	15
7.	Pembangunan Gantung Arap	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Pekerjaan Konstruksi	22 Mar 2016	397.000.000	400.000.000	400.000.000	99%	19
8.	Interior Ruang Kerja Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Pekerjaan Konstruksi	22 Nov 2013	293.730.000	450.000.000	299.315.000	98%	15
9.	Penyelesaian Pembangunan Monumen Tagu Pesawat	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Pekerjaan Konstruksi	26 Feb 2015	259.500.000	272.000.000	259.700.000	100%	15
10.	Pembangunan Monumen Tagu Pesawat	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	Pekerjaan Konstruksi	16 Jun 2014	407.000.000	408.000.000	408.000.000	100%	14

List Proyek yang dimenangkan CV. Bintang Griyatama

## Pengadaan Makan dan Minum Atlit KONI SULTRA



12

Perusahaan Peminat



1

Mengajukan Penawaran (CV Bintang Griyatama)



11

11 perusahaan lain hanya ikut mendaftar tetapi tidak mengajukan penawaran.



Di bidang perdagangan umum, usaha yang dikerjakan CV Bintang Griyatama di antaranya alat komputer, network elemen, alat tulis kantor, elektrikal, komputerisasi, mekanikal, kendaraan bermotor, tekstil, makanan dan minuman.







Sulawesi Selatan

## Jauh Sasaran Sapi Gaduhan

*Bantuan ternak sapi di Sulawesi Selatan kerap tidak tepat sasaran. Sebelum bergulir ke peternak lain, sapi mati atau dijual.*

TIGA lelaki itu asik mengobrol di bawah naungan gubuk kayu yang terbuka. Salah seorang dari mereka berdiri menyambut penulis yang bertandang ke gubuk beralaskan

rerumputan kering itu pada 27 Juli 2017.

Sebut saja nama lelaki itu Anton. Dia adalah salah satu penerima bantuan sapi ternak dari pemerintah di Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. "Ini dulunya kandang sapi,"

kata Anton merujuk pada gubuk kayu itu.

Anton mempersilakan penulis duduk di kursi plastik. Di atas meja, terhidang gelas berisi sirup merah dan toples berisi kue kering coklat. Sore itu, cahaya matahari menerobos masuk dari sela-sela dinding kayu gubuk itu.

Anton bercerita, ia menerima bantuan seekor sapi dari pemerintah daerah pada Mei 2016. Awalnya, Anton mengetahui ada pembagian ternak dari sepupunya yang merupakan ketua kelompok tani di Desa Turutea. Untuk mendapat sapi bantuan itu, Anton harus menyerahkan salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Bagi pekerja serabutan ini, syarat itu masih ringan. Yang memberatkan Anton adalah keharusan menyerahkan uang sebesar Rp 1 juta.

Anton sempat bertanya-tanya mengapa untuk mendapat bantuan dia malah harus membayar. “Biasanya kan gratis,” kata dia. Namun, karena terbuai oleh bayangan akan mendapat keuntungan, Anton nekat meminjam uang dari tetangganya. Itu pun, Anton hanya bisa mengumpulkan Rp 700 ribu.

Waktu itu, menurut Anton, ada tujuh anggota kelompok tani yang memperoleh bantuan sapi. “Saya mendapatkan sapi terkecil,” kata Anton. “Mungkin karena saya hanya menyeter Rp 700.000,” ujar bapak satu anak ini.

Anton hanya bertahan memelihara sapi itu selama setahun. Menurut dia,

sapi bantuan itu makannya pilih-pilih. Si sapi hanya mau makan rumput hijau yang masih segar. Padahal, Desa Turatera termasuk wilayah gersang. Rumput hijau nan segar tak bisa ditemukan di sembarang tempat. “Di sini susah mencari rumput. Saya kewalahan,” kata Anton.

Bisa jadi karena kurang makan, sapi bantuan itu sakit-sakitan. Anton pun menelepon anggota tim pendamping peternak dari Dinas Peternakan. Tadinya, selain melapor, Anton berharap petugas akan mengobati sapihnya. “Eh, dia malah meminta uang bensin,” kata Anton. “Karena tak punya uang, saya *ndak* kasih.” Semangat Anton untuk terus memelihara sapi mulai goyah. Apalagi, sejumlah tetangga menyarankan dia menjual sapi tersebut. Alasan mereka, kalau pun tidak mati, sapi itu bisa saja dicuri. Di samping itu, anggota kelompok tani penerima bantuan lainnya lebih dulu menjual sapi mereka.

Anton sempat meminta pendapat ketua kelompok tani. Sang ketua awalnya menyarankan Anton tetap memelihara sapi itu untuk berjaga-jaga bila ada petugas dari Dinas Peternakan yang datang memeriksa. Tapi, di ujung percakapan, ketua

Tahun : 2016		Data eProc 2016	
Kategori : Semua Sumber Dana : Semua Entitas : Semua LPSE : LPSE Provinsi Sulawesi Se Sektor/HPD : DINAS PERTERNAKAN DA	2 Proyek 2 Pagi 2 HPS 2 Kontrak 2 Pagi 2 HPS 2 Kontrak	2 Skor 96 % 97 % 1 1 1	2 Kontrak 25

10 Proyek eProc 2016							Potensi Realisasi		
NO.	PROJEK	PENYEDIA	KATEGORI	PENGUMUMAN	NILAI KONTRAK	PAJU	HPS	KH	SKOR
1	Pengadaan Ternak Sapi Pitung untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kab. Enrekang	CV PRO POCOROGAN	Pengadaan Barang	21 Oct 2016	2.257.000.000	2.340.000.000	2.340.000.000	96%	18
2	Pengadaan Ternak Sapi Pitung untuk diserahkan kepada Masyarakat di Arah. Kabupaten Selayar	CV PRO POCOROGAN	Pengadaan Barang	21 Oct 2016	1.318.450.000	1.365.000.000	1.365.000.000	87%	18
3	Bekas Barak pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis	CV PRO POCOROGAN	Pengadaan Barang	24 Aug 2016	1.826.390.000	1.874.000.000	1.874.000.000	97%	17
4	Pengadaan Ternak Sapi Pitung untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kab. Jeneponto	CV KIRANI MAAL ATAN	Pengadaan Barang	21 Oct 2016	1.889.000.000	1.890.000.000	1.890.000.000	97%	17
5	Pengadaan Ternak Sapi Pitung untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kab. Bukekuta	CV KIRANI MAAL ATAN	Pengadaan Barang	21 Oct 2016	1.880.000.000	1.900.000.000	1.890.000.000	96%	17
6	Pengadaan Ternak Sapi Pitung untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kabupaten Selayar	CV KIRANI MAAL ATAN	Pengadaan Barang	21 Oct 2016	1.316.000.000	1.305.000.000	1.305.000.000	96%	17
7	Pengadaan Ternak Sapi Pitung untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kab. Pangajene	CV PUJI RAJAYA BANGKOP	Pengadaan Barang	28 Oct 2016	592.000.000	585.000.000	585.000.000	99%	16
8	Bekas Barak Ternak SKI yang akan diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan Pengembangan Ternak Unggas	CV ERIGITA PRANITA PUTRA	Pengadaan Barang	1 Aug 2016	4.187.136.000	4.211.000.000	4.211.000.000	99%	16
9	Bekas Barak pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Rabies	CV MANDARINDO PENALASA	Pengadaan Barang	16 Sep 2016	3.916.000.000	3.905.000.000	3.905.000.000	99%	16
10	Pengadaan Ternak Sapi Pitung untuk diserahkan kepada Masyarakat di Arah. Kab. Tana Toraja	CV PERTANINDO MAIA	Pengadaan barang	21 Oct 2016	3.282.000.000	3.315.000.000	3.315.000.000	99%	16

10 Besar Pengadaan paling Beresiko di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2016

kelompok tani malah menawarkan sapi Anton dengan harga murah. Ditunggu beberapa waktu, petugas dari Dinas Peternakan tak kunjung datang. Akhirnya, karena perlu uang, Anton pun menjual sapihnya “vKalau dipikir–pikir, tenaga dan biaya perawatan sapi tidak sebanding dengan harga jual,” kata Anton yang juga harus berbagi “keuntungan” dengan tetangga yang meminjam dia uang.

Anton bukanlah satu–satunya peternak yang gagal mengurus sapi bantuan pemerintah. Pada

29 April 2017, penulis menemui beberapa warga Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, yang mendapatkan bantuan sapi. Salah seorang warga, sebut saja namanya Sappo, bercerita bahwa dia menerima sapi betina dari pemerintah pada 2014. Ketika dibagikan, sapi itu umurnya sekitar 1,5 tahun.

Seperti halnya petani lain, Sappo juga kesulitan memelihara sapi karena sedikitnya rumput segar di desanya. Akibatnya, sapi yang dia pelihara sakit-sakitan, lalu mati sekitar setahun sejak serah terima. “Prosedurnya,

apabila sapi mati, tinggal dilaporkan ke kepala desa,” ujar Sappo. Sekretaris Desa Bontomanai, Bustam, membenarkan bahwa pada 2014 sejumlah warga menerima sapi bantuan dari pemerintah. Bantuan itu merupakan usulan pada tahun anggaran 2013. Pada 2015-2016, tak ada warga desa yang menerima bantuan sapi. Desa Bontomanai akan menerima bantuan sapi lagi pada tahun ini, yang merupakan usulan tahun 2014.

Bustam menerangkan banyak warga desa yang kesulitan memelihara ternak bantuan itu karena sebagian besar wilayah Jeneponto merupakan tanah berbatu yang tandus. Rumput hijau untuk makanan ternak terbatas. “Apalagi, pencuri ternak juga merajalela,” kata Bustam. Cerita dari warga penerima bantuan sapi di Kecamatan Turatea, Jeneponto, juga sama suramnya. Tono, bukan nama sebenarnya, menerima sapi bantuan pada 2015. Tono mendapatkan sapi karena pengurus kelompok ternak di kecamatan itu masih keluarga dia.

Sebelum menerima bantuan sapi, menurut Tono, setiap calon penerima mendapat penyuluhan dari petugas Dinas Peternakan. Mereka diajari cara

membuat kandang dan memelihara sapi, serta diperkenalkan dengan teknik inseminasi buatan. Nyatanya, menurut Tono, memelihara sapi di wilayah yang kurang rumput segar tetap saja susah. Apalagi, sapi yang dibagikan sebagaimana kurang sehat. Karena itu, Tono pun menjual sapi bantuan itu. Menurut dia, belasan orang anggota kelompok tani yang dia kenal juga menjual sapi sebulan setelah pembagian. “Kebiasaan di sini, sapi pembagian dijual karena susah mengurusnya,” ujar Tono.

\*\*\*

Meski cerita kegagalan pengurusan sapi bantuan berserak di banyak tempat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menganggarkan pengadaan sapi bantuan untuk masyarakat. Jumlah anggarannya pun dari tahun ke tahun meningkat. Di Kabupaten Jeneponto, misalnya. Pada 2015, pemerintah menganggarkan bantuan sapi sebesar Rp 219 juta yang lelangnya dimenangkan CV Mawaddah. Lalu, pada 2016, anggaran pengadaan sapi bantuan melonjak menjadi Rp 1,889 miliar. Kali ini, lelang pengadaan sapi bantuan dimenangkan CV Kiswah Ma'al Attar.

## Pengadaan Bantuan Sapi di Sulawesi Utara 2016



### Poin BPK yang Menjadi sorotan

1. Penyaluran ternak gaduhan sering tidak disertai perjanjian penggaduhan. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk mengontrol dan memonitor hewan ternak yang digaduhkan.
2. Usulan masuk setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pada penjabaran APBD 2014, tidak dilampirkan daftar nama penerima ternak gaduhan, alamat penerima, serta besaran nilai yang akan diberikan kepada masing-masing penerima.

Tak hanya Kabupaten Jeneponto yang menerima bantuan sapi potong. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sulawesi Selatan, pada 2016, pemerintah menyediakan anggaran bantuan sapi potong untuk Kabupaten Bulukumba, senilai Rp 1,880 miliar, dan Kabupaten Sinjai, senilai Rp 1,316 miliar. Pemenang lelang pengadaan sapi

**Kabupaten Jeneponto**  
**Rp 1,889 miliar**  
CV Kiswah Ma'al Attar

**Kabupaten Bulukumba**  
**Rp 1,880 miliar**  
CV Kiswah Ma'al Attar

**Kabupaten Sinjai**  
**Rp 1,316 miliar**  
CV Kiswah Ma'al Attar

**Kabupaten Enrekang**  
**Rp 2,257 miliar**  
CV. Pao Poerwosari

**Kabupaten Takalar**  
**Rp 1,318 miliar**  
CV. Pao Poerwosari

potong di kedua kabupaten ini juga CV Kiswah Ma'al Attar.

Pada tahun yang sama, Pemerintah Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan sapi potong untuk Kabupaten Enrekang, senilai Rp 2,257 miliar, dan Kabupaten Takalar, senilai Rp 1,318 miliar. Pemenang lelang pengadaan sapi potong untuk kedua kabupaten itu adalah CV. Pao Poerwosari. Penulis sempat menelusuri

perusahaan CV Kiswah Ma'al Attar yang sering memenangkan tender pengadaan sapi bantuan. Dalam dokumen lelang tertulis direktur perusahaan itu adalah Rizal Effendy. Pada 9 April 2017, penulis mendatangi alamat CV Kiswah di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7, Makassar, seperti tertera di situs LPSE Sulawesi Selatan. Ternyata, itu alamat rumah ibu kandung Rizal. Sementara kantor CV Kiswah telah pindah ke Jalan Pelita

Raya, Makassar, sekitar 10 kilometer dari alamat semula.

Ketika ditemui di rumahnya, ibunda Rizal menuturkan, anaknya bekerja di CV Kiswah sejak 2014. Setelah CV Kiswah memenangi tender pengadaan sapi pada 2015-2016, Rizal yang lulusan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin diangkat menjadi salah satu direktur. "Anak saya sebenarnya cuma ikut bos-bos itu," kata sang bunda.

Penulis tak sempat bertemu langsung dengan Rizal karena dia sibuk mengikuti lelang di beberapa daerah. Di LPSE Sulawesi Selatan, CV Kiswah tak hanya tercatat sebagai pemenang tender pengadaan ternak. Perusahaan ini juga memenangi berbagai lelang, dari pengadaan pakaian seragam sampai alat-alat olahraga.

\*\*\*\*

Penyaluran bantuan sapi di Sulawesi Selatan termasuk poin yang mendapat sorotan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015. Menurut BPK, pengelolaan aset berupa hewan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan "belum memadai". Badan Pemeriksa Keuangan mencatat,

per 31 Desember 2015, ada 472 ekor sapi—senilai Rp 1,853 miliar—yang digaduhkan alias diserahkan kepada masyarakat untuk dipelihara dengan perjanjian tertentu.

Aturan main resminya, menurut BPK, penggadauhan hewan ternak harus didasari dokumen perjanjian antara Dinas Peternakan dan kelompok masyarakat penerima hewan gaduhan. Dokumen perjanjian tersebut mengatur bahwa penerima sapi gaduhan wajib melaporkan perkembangan ternak yang dipeliharanya, serta menyerahkan keturunan hewan itu kepada Dinas Peternakan. Sapi induk baru menjadi milik peternak—berdasarkan akta hibah—setelah mereka memenuhi kewajibannya.

Faktanya, menurut temuan BPK, penyaluran ternak gaduhan sering tidak disertai perjanjian penggadauhan. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk mengontrol dan memonitor hewan ternak yang digaduhkan. Dokumen tersebut juga penting sebagai pertanggungjawaban jika hewan ternak itu mati atau mempunyai keturunan.

Badan Pemeriksa Keuangan juga menyebutkan bahwa pengusulan

<b>Nama Paket</b>	<b>Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kab. Jeneponto</b>	<b>Kode Lelang</b>	4644036
<b>Propinsi</b>	Sulawesi Selatan	<b>Akhir Lelang</b>	
<b>Kota/kabupaten</b>	Makassar (Kota)	<b>Pengumuman</b>	2016-10-21
<b>LPSE</b>	LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	<b>Tahun Anggaran</b>	2016
<b>SKPD</b>	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	<b>Kategori</b>	Pengadaan Barang
<b>Agen</b>	-	<b>Sumber Dana</b>	APBNP
<b>Panitia</b>	Pokja VIII Pengadaan Barang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan TA. 2016	<b>Pagu</b>	1.950.000.000
<b>Jumlah Peserta</b>	0 / 0	<b>HPS</b>	1.950.000.000
<b>Penyedia</b>	<b>CV. KISWAH MA'AL ATTAR</b>	<b>Nilai Penawaran</b>	
<b>Direktur</b>		<b>Skor PFA</b>	17
		Partisipasi:	5
		Monopoli:	3
		Nilai:	3
		Efisiensi:	5
		Waktu:	1
<b>NPWP Penyedia</b>	72.286.971.6-801.000	<b>Hasil Lelang</b>	1.889.000.000

nilai Paket Pengadaan bantuan Sapi Potong untuk daerah Kabupaten Jenep.onto



ternak gaduhan dari kelompok masyarakat tidak sesuai aturan. Pada 2014, misalnya, usulan masuk setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akibatnya, pada penjabaran APBD 2014, tidak dilampirkan daftar nama penerima ternak gaduhan, alamat penerima, serta besaran nilai yang akan diberikan kepada masing-masing penerima.

Meski menemukan indikasi penyimpangan, BPK tidak tegas-tegas menyatakan ada kerugian negara dalam penyaluran bantuan sapi gaduhan. Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Endang Tuti Kardiani, mengatakan temuan BPK soal tenak gaduhan itu sifatnya administrasi saja.

Mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Profesor Muladno, memberi catatan khusus atas bantuan ternak yang dia sebut “berorientasi belas kasihan” itu. Menurut Muladno, program serupa rawan terjangkau korupsi. “Yang diuntungkan politikus partai dan pedagang ternak,” kata dia. Politikus partai, menurut Muladno, bisa mempengaruhi pemerintah daerah untuk membagikan ternak itu kepada konstituen si politikus atau

partainya. “Dasar pemilihan bukan karena profesionalitas peternak, tetapi karena loyalitas politik mereka,” kata Muladno.

Adapun para pedagang, kata Muladno, mendapat untung tak hanya ketika menjadi pemenang lelang. Mereka juga bisa meraup untung ketika peternak kembali menjual hewan gaduhan dengan harga murah. “Yang banyak menikmati madunya adalah pedagang. Sedangkan peternak tak beranjak baik nasibnya,” kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor ini.

Pejabat Humas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rusdin, menolak bila bantuan ternak sapi disebut salah sasaran. Menurut dia, lelang pengadaan sapi bantuan berlangsung terbuka. Dinas Peternakan menyalurkan bantuan ternak berdasarkan kebutuhan dan proposal dari kelompok tani.

Sebelum menyalurkan bantuan, kata Rusdin, Dinas Peternakan juga melakukan kunjungan lapangan untuk menilai apakah kelompok pengirim proposal layak mendapat bantuan atau tidak. “Biasanya, setiap tim kami turun meninjau lokasi, pengurus kelompok tani berjanji membuat

kandang dan merawat ternaknya dengan baik,” kata Rusdin.

Masalahnya, menurut Rusdin, setelah mendapat bantuan, sebagian peternak tidak memenuhi janjinya. Mereka tak merawat ternak dengan baik, sehingga banyak ternak yang mati. Ketika ternak mati, menurut Rusdin, banyak kelompok tani yang menunda-nunda laporan. “Makanya, menurut temuan BPK, banyak sapi yang tidak tercatat,” ujar Rusdin.

CV. KISWAH MA'AL ATTAR									
DATA e-PROC 2016: PENYEDIA									
Σ Kontrak	Rp. 6.198.965.000	Σ HPS	Rp. 6.454.812.000						
× Kontrak	Rp. 1.239.797.000	× HPS	Rp. 1.290.962.400						
× Kontrak:HPS	96 %	× Pagu	Rp. 1.290.962.400						
Σ Paket	5 Paket	NPWP	72.286.971.6-801.000						
× Triwulan	ke-4	Tahun	Semua 2017 2016 2015 0						
NO.	NAMA PAKET	LPSE	KATEGORI	PENGUMUMAN	NILAI KONTRAK	PAGU	HPS	KONTRAK:HPS	SKOR
1.	Belanja Barang Persiapan Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga	LPSE Kota Makassar	Pengadaan Barang	9 Oct 2016	815.483.000	889.812.000	889.812.000	92%	15
2.	Belanja Barang Fiskal Lainnya pada Kegiatan Pengembangan Suidaya Sapi Perah Kab. Enrekang	LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	Pengadaan Barang	1 Aug 2016	298.500.000	300.000.000	300.000.000	100%	14
3.	Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kab. Jempang	LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	Pengadaan Barang	21 Oct 2016	1.889.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	97%	17
4.	Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kab. Bulukumba	LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	Pengadaan Barang	21 Oct 2016	1.880.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	96%	17
5.	Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kabupaten Singsing	LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	Pengadaan Barang	21 Oct 2016	1.316.000.000	1.365.000.000	1.365.000.000	96%	17

Semua Proyek yang pernah Dimenangkan oleh CV. Kiswah Ma'al Attar



Sulawesi Selatan

# Gelap Bantuan Traktor Tangan

*Bantuan 75 traktor tangan dari APBD Sulawesi Selatan tidak jelas penyalurannya. Janggal sejak proses lelang.*

Foto Ilustrasi

**JALAN** berbatu sepanjang 30 meteran menghubungkan gudang itu dengan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Waktu menunjukkan pukul 11.30 ketika Makassar Terkini mendatangi tempat penyimpanan alat pertanian itu pada Jumat 30 Juni 2017.

Di sana, hanya ada seorang lelaki yang mengaku sebagai penjaga gudang milik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan itu. Dari celah gerbang gudang, terlihat dua unit traktor tangan roda dua yang belum digunakan. “Itu milik petani dari Pinrang,” kata penjaga gudang yang mengaku sudah bertugas sejak 2008 dan tinggal di rumah dinas dalam kawasan gudang. Tugas dia, antara lain, mengeluarkan alat pertanian dari dalam gudang jika ada kelompok tani yang membawa surat pengantar pengambilan barang dari Dinas Ketahanan Pangan.

*Makassar Terkini* bertanya tentang cara mendapatkan bantuan traktor seperti itu. “Susah. Saya saja tidak bisa dapat. Padahal,” kata si penjaga gudang, “saya juga punya kelompok tani.” Menurut dia, untuk mendapatkan traktor tangan atau alat mesin pertanian, petani harus mengurus berbagai macam surat

ke Dinas Ketahanan Pangan. “Kalau sudah disetujui, baru bisa ambil barang di gudang,” katanya. Perbincangan terhenti ketika azan menjelang salat Jumat berkumandang. Si penjaga gudang—dengan sepeda motor yang baru dia bersihkan—siap berangkat ke masjid.

*Makassar Terkini* mendatangi gudang pertanian tersebut untuk menelusuri keberadaan traktor tangan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2015. Sampai dua tahun setelah lelang pengadaan traktor tangan itu, kelompok tani di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan mengaku tak mengetahui ada bantuan traktor yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan. “Saya tidak tahu ada pembagian traktor dari provinsi,” kata Tallasa, Ketua Kelompok Tani Ashabul Yamin, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

Faisal Daeng Rurung, ketua Kelompok Tani Tompobalang 1, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, mengatakan hal senada. “Tidak ada infonya,” kata Faisal. “Kami juga tak tahu ada bantuan traktor dari provinsi,” kata M Asri, anggota

Kelompok Tani dan Nelayan Andalan, Kabupaten Bantaeng. Gudang pertanian Dinas Pertanian Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar

\*\*\*\*

Cerita bantuan traktor tangan bermula pada 25 Agustus 2015. Kala itu, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulawesi Selatan—sekarang Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura—membuka lelang sederhana pengadaan traktor tangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sulawesi Selatan. Nilai kontrak yang disetujui Rp 2,39 miliar dari harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 2,4 miliar dan pagu anggaran Rp 2,625 miliar. Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sulawesi Selatan mengumumkan pemenang lelang pada 8 September 2015. Dari 27 perusahaan penyedia barang yang menyampaikan penawaran, CV Wisama Cahaya Rezky dinyatakan sebagai pemenang. CV Wisama menyampaikan penawaran Rp 2,39 miliar untuk pengadaan 75 unit traktor tangan itu.

Berdasarkan catatan situs [www.opentender.net](http://www.opentender.net) yang dikelola Indonesia Corruption Watch (ICW),

tender traktor tangan termasuk dalam “10 Besar” pengadaan barang di Sulawesi Selatan yang rawan korupsi. Dari rentang skor 1 sampai 20 yang dirumuskan [www.opentender.net](http://www.opentender.net), pengadaan traktor tangan mendapat angka 18. Semakin besar angkanya, semakin besar pula peluang penyalahgunaannya. “Skor di atas 15 itu lampu merah potensi pelanggaran,” kata Kes Tutorang, peneliti ICW.

*Makassar Terkini* menelusuri kembali jejak lelang traktor tangan di website LPSE Sulawesi Selatan. Dari situ, ada sejumlah kejanggalan yang terbaca. Antara lain, dari total 27 perusahaan yang mendaftar lelang, hanya tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Dari tiga perusahaan itu, hanya satu yang melengkapi berkas penawaran, yakni CV Wisama Cahaya Rezky.

Kejanggalan berikutnya, CV Manunggal Jaya yang memberikan penawaran lebih rendah dari CV Wisama malah gagal dalam tender. Perusahaan ini gugur karena tidak melampirkan surat penawaran pekerjaan. Dalam beberapa kegiatan tender di LPSE Sulawesi Selatan, CV Manunggal Jaya beberapa kali tercatat mendaftar. Namun,

perusahaan ini tidak menyampaikan penawaran harga.

Perusahaan lain yang juga memberikan penawaran sedikit lebih tinggi daripada CV Wisama adalah CV Putra Jongaya. Perusahaan ini tak menang lelang karena dokumen penawaran teknisnya tidak lengkap. Kejanggalan lainnya, dua peserta tender yaitu CV Alam Mutiara dan PT Wahana Abadi Pratama, berkantor di satu ruko di Jalan Skarda N, Kompleks Mangasa, nomor 4 Makassar. Dua peserta tender lainnya memiliki kemiripan nama, yakni CV Permata Wisama dan CV Wisama Cahaya Rezky. Penelusuran *Makassar Terkini* menemukan pemilik kedua perusahaan ini juga punya hubungan kekerabatan.

Kepala Seksi Administrasi, Registrasi, dan Verifikasi dari LPSE Sulawesi Selatan, Herbudhie Ristanto, mengatakan fungsi dan tugas lembaganya hanya mempertemukan perusahaan rekanan dan panitia pengadaan agar lelang berlangsung transparan. Menurut dia, LPSE tak mencampuri proses lelang. Yang menentukan jadwal dan pemenang lelang adalah kelompok kerja di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan. “Ranah kami hanya

memfasilitasi,” kata Herbudhie. Setali tiga uang, Kepala ULP Sulawesi Selatan Urganawan pun tak menjelaskan dengan rinci proses lelang. “Kalau mau tahu persis soal itu (lelang traktor tangan), tanya orang Dinas Pertanian,” kata Urganawan. “Yang jelas, kami sudah diaudit.” Untuk mencari titik terang, *Makassar Terkini* menelusuri perusahaan pemenang tender. Berdasarkan data di LPSE, CV Wisama beralamat di Jalan Karunrung Raya Nomor 27, Kota Makassar. Direktur perusahaan itu tercatat bernama Munawar. Ketika dikunjungi, itu ternyata alamat sebuah rumah. Tidak ada papan nama atau penanda bahwa rumah itu kantor perusahaan.

Sejumlah tetangga memberi tahu bahwa pemilik rumah bernama Alif, pensiunan pegawai negeri di Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Selatan. Ketika *Makassar Terkini* mengetuk rumah itu, Alif keluar menyambut. Namun, dia seperti kebingungan ketika ditanya apakah rumah itu merupakan kantor CV Wisama dengan direktur bernama Munawar. Alif kemudian masuk lagi dan memanggil istrinya. Sang istri membenarkan bahwa rumahnya pernah dijadikan kantor CV Wisama. Tapi, direktur perusahaan itu namanya

Haji Muhammad Azhar, bukan Munawar. “Sudah pindah ke Maros,” kata perempuan yang mengaku sebagai kakak dari Azhar itu. Setelah adiknya menikah dan pindah ke Maros, rumah itu masih dijadikan alamat surat-menyurat CV Wisama. Setelah beberapa kali dihubungi lewat telepon, Azhar akhirnya bersedia ditemui di Maros. Pertemuan berlangsung di sebuah kafe dekat terminal kota Maros pada 18 Mei lalu. Kepada *Makassar Terkini*, Azhar mengaku sebagai pemilik CV Wisama. Sewaktu CV Wisama memenangi tender traktor tangan, menurut Azhar, dia masih menjabat sebagai direktur perusahaan. Adapun Munawar baru menjadi direktur CV Wisama setelah perubahan akta di depan notaris pada 26 Juli 2016.

Azhar masih ingat ketika CV Wisama memenangi lelang 75 unit traktor tangan merek Yanmar pada 2015. “Waktu itu, saya sendiri yang membuat penawaran,” kata dia. Pengakuan Azhar terkonfirmasi oleh data sistem informasi rencana umum pengadaan di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/pencarian>. Dalam situs itu tercatat bahwa paket traktor tangan dengan nomor pengadaan ID 3861283

itu berjumlah 75 unit. Meski memenangkan tender, Azhar mengaku tidak pernah melihat langsung traktor tangan itu. “Perusahaan saya dipinjam,” katanya. Sebagai Direktur CV Wisama, Azhar mengaku menandatangani berita acara serah terima barang, lengkap dengan foto-foto kelompok tani yang disebut penerima traktor tangan. Azhar menerangkan, berdasarkan dokumen berita acara yang dia baca, 75 traktor tangan dibagikan ke 47 kelompok tani. Namun, Azhar mengaku tidak tahu bagaimana kelanjutan distribusi traktor tangan itu. “Perusahaan saya hanya ditugaskan untuk pengadaan. Pendistribusian ke petani tugas Dinas Pertanian,” kata Azhar.

Azhar juga berjanji memberikan dokumen kontrak pengadaan traktor tangan itu. Tapi, belakangan dia menarik janjinya. “Saya tidak berhak memberikan data. Silakan ke Dinas Pertanian,” katanya. Di ujung pembicaraan, Azhar mengatakan bahwa yang meminjam perusahaan dia adalah Andi Pahlevi, keponakan Gubernur Syahrul Yasin Limpo. “Yang pake (perusahaan) Andi Pahlevi, keponakan Bapak Syahrul (Gubernur Sulawesi Selatan),” kata Azhar.



Azhar kala itu percaya, perusahaannya tidak akan digunakan untuk hal buruk. Sebab ada nama besar Gubernur Sulawesi Selatan yang harus dijaga. “Saya percaya Pope (panggilan Andi Pahlevi). Kan ada nama besar yang dijaga, Pak Syahrul tidak pernah ajarkan kita macam-macam,” kata Azhar.

Andi Pahlevi kini tercatat sebagai Anggota DPRD Kota Makassar. Ia duduk di Komisi C mewakili Partai Gerindra untuk periode 2014 – 2019. Ditemui di ruang rapat Komisi C DPRD Kota Makassar pada 10 Juli 2017, Pahlevi membantah pernah meminjam CV Wisama untuk ikut lelang traktor tangan. “Saya tidak tahu namanya Haji Azhar, apalagi pinjam perusahaannya,” kata Pahlevi. “Saya juga sudah lama tidak mengurus kegiatan seperti itu.”

Diberi gambaran ciri-ciri fisik Haji Azhar dan alamat rumahnya, Pahlevi tetap geleng-geleng kepala. “Kalau ketemu langsung mungkin saya kenal. Yang jelas, saya tidak tahu soal pinjam-pinjam perusahaan,” kata Pahlevi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan praktek

pinjam meminjam perusahaan melanggar aturan dan rawan korupsi. “Perusahaan yang dipinjam pasti meminta uang komisi,” kata Syamsuddin. “Kalau betul yang pinjam perusahaan itu anggota DPRD, itu kesalahan besar.”

\*\*\*\*

*Makassar Terkini* bolak-balik meminta penjelasan ke Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Namun, tak ada pejabat dinas yang bersedia memberi keterangan yang gamblang. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Fitriani, enggan berkomentar soal bantuan traktor tangan itu. “Saya tidak mau lagi bahas traktor, sudah selesai. Semua sudah dibagi,” kata dia.

Fitriani menyarankan *Makassar Terkini* menemui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan pangan, Arfain. *Makassar Terkini* sebelumnya telah menemui Arfain di kantornya pada 16 Mei 2017. Namun, kala itu, Arfain mengaku tidak tahu soal proyek traktor tangan tersebut. “Saya orang baru di sini,” kata Arfain.

Sepekan kemudian, pada 23 Mei 2017, *Makassar Terkini* kembali menemui Arfain. Dia tetap tidak



## Bantuan Traktor Tangan

**75** Unit Merk Yanmar

**Pagu: Rp 2,625 miliar**  
**HPS: Rp 2,4 miliar**  
**Kontrak: Rp 2,39 miliar**

### Kejanggalan

1. Total 27 perusahaan yang mendaftar lelang, hanya tiga perusahaan yang mengajukan penawaran.
2. CV Manunggal Jaya yang memberikan penawaran lebih rendah dari CV Wisama malah gagal dalam tender.
3. Dua peserta tender yaitu CV Alam Mutiara dan PT Wahana Abadi Pratama, berkantor di satu ruko di Jalan Skarda N, Kompleks Mangasa, nomor 4 Makassar

mau memberikan data penerima bantuan traktor tangan yang dibiayai APBD 2015 itu. Namun, kali ini Arfain membuka sedikit jalan. “Silakan hubungi Pak Hermanto,” katanya.

Hermanto adalah bekas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang digantikan Arfain. Hermanto kini menjalani masa pensiun sambil menjadi petani bawang di Kabupaten Enrekang. Nama Hermanto juga disebut-sebut oleh Amin Manurung, Ketua Kelompok Kerja ULP pengadaan traktor tangan pada tahun anggaran 2015. Menurut Amin, semua proses lelang traktor tangan sudah sesuai prosedur. “Soal barangnya ada atau tidak, Pak Hermanto yang tahu,” kata Amin.

Pada 5 Juni 2017, *Makassar Terkini* menemui Hermanto di Kantor Dinas Ketahanan Pangan. Saat itu, Hermanto mengajak masuk ke sebuah ruangan depan aula. “Proyek ini memang ada. Tapi rahasia. Hanya penyidik yang bisa minta datanya,” kata Hermanto. Dalam proyek bagi-bagi traktor tangan itu, Hermanto mengaku bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Namun, ketika ditanya lagi jumlah dan penerima bantuan traktor tangan, Hermanto kembali terdiam. “Saya lupa,” kata dia.

Tak kunjung mendapat daftar penerima traktor tangan, pada 26 Mei 2017, *Makassar Terkini* melayangkan surat permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Namun, sampai tenggat 10 hari kerja hari yang diatur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Ketahanan Pangan tak kunjung memberikan informasi yang diminta. “Silakan komunikasi dengan Pak Hermanto,” kata Arfain mengulangi sarannya.

Membentur “tembok” Dinas Ketahanan Pangan provinsi, *Makassar Terkini* mencoba menelusuri ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Di samping meminta data ke dinas-dinas pertanian, wartawan media ini juga mencari informasi ke jaringan kelompok tani.

Dari sejumlah dinas dan kelompok tani di wilayah kabupaten dan kota, *Makassar Terkini* mendapat data penerima bantuan traktor tangan dari pemerintah pada 2015. Daftar kelompok tani penerima bantuan traktor tangan misalnya diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng. Namun, bantuan traktor di tiga daerah ini bukan berasal dari APBD Sulawesi Selatan.

“Kami dapat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional),” kata Kepala Dinas Kabupaten Barru, Aminullah Arsyad.

Jaringan kelompok tani dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dihubungi *Makassar Terkini* di Kabupaten Sidrap, Maros, Bone, dan Takalar juga menyatakan tidak tahu dimana traktor tangan dibagikan.

“Yang ada hanya bantuan dari pusat,” kata Ilham Lahiya, Anggota LSM Bumi Mentari di Maros.

Walhasil, sampai laporan penelusuran ini diturunkan, jejak bantuan 75 traktor tangan yang dibiayai APBD Sulawesi Selatan tahun 2015 masih “gelap”.

The screenshot shows the 'Data eProc 2015' interface. On the left, there are filters for Tahun (2015), Kategori (Barang), Sumber Data (Semua), Entitas (Semua), and LPSE (LPSE Provinsi Sulawesi Selatan). On the right, a summary table displays various metrics:

Data eProc 2015			
Proyek	252	Skor	15
Pajak	Rp. 312.594.773.451	Kontrak Pajak	97%
HPS	Rp. 605.186.047.546	Kontrak HPS	98%
Kontrak	Rp. 497.568.153.547	LPSE	1
Pajak	Rp. 1.556.430.433	Agensi	3
HPS	Rp. 1.928.079.807	SHUKI	26
Kontrak	Rp. 1.899.118.507	Pemangku	183

**10 Proyek eProc 2015**

NO. PROYEK	PENYEDIA	KATEGORI	PENGUMUMAN	NILAI KONTRAK	PAGU	HPS	KH	SKOR
1. Pengadaan Asat Kesehatan dan Kelembutan Rumah Sate	PT. CIPA SAPANA LABOUTOR	Pengadaan Barang	30 Sep 2015	15.490.807.000	11.888.565.150	15.501.274.130	100%	19
2. Pengadaan Akses APSC Perubahan RSUD Lingsar Baji Pura Sotai	PT. METRA TRITUNGGA ABADI	Pengadaan Barang	17 Nov 2015	2.872.000.000	2.073.442.922	2.073.442.922	100%	19
3. Pengadaan Model Pengadaan asat-Asat Kelembutan (Asat IOC dan asat-Asat KTO)	PT. SHAGAMA GARAMAS	Pengadaan Barang	30 Sep 2015	18.815.170.000	20.000.000.000	19.838.107.900	100%	19
4. Pengadaan Feronco Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 7	CY. DRAGANTARA MUDA MANDIRI	Pengadaan Barang	11 Sep 2015	6.298.677.000	6.300.000.000	6.299.832.000	100%	18
5. Pengadaan Atraksi Intensifikasi Tanaman Kopi Paket 8	PT. DYLAN MAJERAN PERMA	Pengadaan Barang	2 Sep 2015	2.620.000.000	2.615.000.000	2.628.123.000	100%	18
6. Pengadaan Hord Traktor	CY. WISMA CANAKA REZY	Pengadaan Barang	29 Aug 2015	2.880.000.000	2.820.000.000	2.400.000.000	100%	18
7. Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3	PT. MSIAN	Pengadaan Barang	16 Aug 2015	12.890.760.000	12.990.000.000	12.941.280.000	100%	18
8. Belanja Pembelian dan Nersin pada Kapatan Fasilitas RPH Ruminansia Di Kota Pare Pare	CY. TUNGGA PUTRA	Pengadaan Barang	12 Oct 2015	1.743.660.000	1.730.450.000	1.750.600.000	100%	18
9. Pengadaan Pabasa Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 5	PT. MICAL UTAMA MANDIRI	Pengadaan Barang	21 Sep 2015	2.916.400.000	2.990.000.000	2.940.050.000	98%	18
10. Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 8	PT. TAWARA LESTARI ABADI	Pengadaan Barang	19 Sep 2015	3.804.940.000	3.610.000.000	3.860.904.000	100%	17

10 Besar Pengadaan paling Beresiko di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2015



Sulawesi Utara

## Main Mata Tender Bus Eksekutif

*Proyek pengadaan mobil di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara diduga dikuasai oleh satu perusahaan sejak tujuh tahun lalu. Spesifikasi yang mendetil di tiap tender diduga diatur untuk memenangkan pihak tertentu. Opentender.net menyimpulkan ada potensi korupsi di tender itu.*

Fasilitas mobil terbaru milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu setara tempat hiburan berjalan. Ada kulkas, perangkat karaoke lengkap dan *high end stereo*, plus pemijat otomatis di kursinya. Semuanya serba otomatis, termasuk pintu-pintunya. “Kenyamanannya setara duduk di pesawat kelas eksekutif. Semua tamu yang merasakannya merasa puas,” kata Wilfred Bororong, awal Juli 2017.

Wilfred adalah sopir yang terpilih mengendarai mobil minibus Toyota Hiace Commuter itu. Ia adalah sopir berpengalaman yang pernah dipercaya membawa mobil Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Ia merasa beruntung dipercaya membawa mobil tersebut. “Remnya enak,” ujar pria yang biasa disapa Apet itu.

Mobil yang keren belum tentu semulus “kelahirannya”. Ada tiga mobil milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang nyaris sama. Ketiganya dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara pada 2016 lewat Biro Umum dengan nilai Rp 2 miliar. Pemenangnya adalah PT Hasrat Abadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui

opentender.net mencatatkan pengadaan mobil mewah ini dengan skor 19, dari skala 1-20. Semakin tinggi skornya, maka proyek itu berindikasi terjadi korupsi.

### **Peserta Tender**

Lelang mobil minibus ini diduga berjalan tak biasa. Beberapa perusahaan yang tercatat mengikuti tender itu, sedari awal sudah

mengetahui kekalahan mereka. “Kami ikut tender itu namun tidak mengirimkan penawaran karena spesifikasinya sudah mengarah ke satu perusahaan,” kata Fanda, perwakilan dari PT Kana Surya Lestari, satu dari sepuluh perusahaan yang mengikuti tender tersebut. Perusahaan yang dimaksud adalah PT Hasjrat Abadi, distributor utama merk Toyota di Indonesia bagian timur.

Fanda menambahkan, PT Hasjrat memang sering memenangi tender kendaraan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. PT Hasjrat, katanya, selalu unggul karena selalu bisa memenuhi spesifikasi yang ditentukan panitia tender. “Jadi kami memilih mundur dan tidak mengirimkan penawaran. Sudah pasti perusahaan kami tidak akan menang,” ujar Fanda.

Ia dan peserta lain tak bisa berbuat banyak. Tender itu dianggap tak melaanggar Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Mereka tak bisa menuding ada monopoli di balik tender itu. “Perpres itu melegalkan hal tersebut,” kata Fanda berpasrah. Proyek senilai Rp 2.030.600.000 tertuang dalam dalam dokumen pengadaan bernomor 01/POKJA ULP 132-RO. UMUM/X/2016, tanggal 25

Oktober 2016. Isinya, pengadaan tiga unit minibus. Polanya menggunakan metode e-Lelang sederhana dengan pascakualifikasi oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: Pokja ULP 132 Provinsi Sulut, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2016.

Proses lelang diikuti 10 peserta. Mereka adalah PT Hasjrat Abadi, CV Multi Teknik, CV Nomat Jaya, CV Trigil, PT Isuzu Mobilindo Plaza, CV Kana Surya Lestari, CV Bumi Inti Nusantara, CV Race, CV Artika, CV Wisanggeni. Selain PT Hasjrat, 9 perusahaan tidak mengirimkan penawaran dan ada yang mundur dari proses tender.

Ada lagi keganjilan lain. Pemilik CV Bumi Inti Nusantara, Vonny Watung-Lasut, mengaku perusahaannya tidak mengikuti tender itu. Ia sudah mencari tahu soal keterlibatan perusahaannya. “Kemungkinan yang mendaftarkan CV Bumi Inti Nusantara adalah staf saya yang ‘nakal’. Sayangnya staf itu kini sudah tidak bekerja lagi di perusahaan kami. Kami pun tak mengetahui dia di mana dan kehilangan kontakannya,” ucap Vonny. Ia menegaskan tidak pernah menandatangani dokumen terkait dengan proyek tersebut. Staf tersebut,

katanya, dulunya adalah orang kepercayaan yang mengelola akun perusahaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). “Mungkin dia sempat mendaftar tapi tidak meneruskan proses itu, karena kami tidak menandatangani dokumen lanjutan dari proses tender itu,” ujarnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Conny Tidayoh mengaku tidak bisa menjelaskan proses tender pengadaan tiga unit minibus itu. Ia beralasan jabatan itu baru diemban sejak Januari 2017, setelah panitia lelang terbentuk. “Tapi pada dasarnya, proses Pengadaan tiga unit minibus,

jika tidak melalui e-katalog, maka dilakukan proses lelang apalagi dengan spesifikasi khusus,” katanya. Meski banyak perusahaan yang ikut mendaftar, katanya, hanya sedikit yang berminat untuk memberikan dokumen penawaran dan melengkapi berkas. “Meski hanya satu penyedia yang memberikan penawaran, maka sesuai aturan Perpres No 4 tahun 2015 proses bisa berlanjut. Satu penyedia saja yang melanjutkan proses tender itu sah,” ujar Tidayoh. Perpres yang dimaksud Tidayoh sejauh ini diperkirakan masih membuka celah untuk terjadi monopoli. Di Pasal 109 ayat (7) poin disebutkan “apabila penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta,

Data eProc 2016			
E Proyek	90	E Skor	94
E Page	Rp. 85.871.196.888	E Kontrak Page	98 %
E HPS	Rp. 84.192.446.375	E Kontrak HPS	97 %
E Kontrak	Rp. 81.879.614.998	E LPSE	1
E Page	Rp. 859.731.073	E Agen	2
E HRS	Rp. 874.471.628	E SKPD	23
E Kontrak	Rp. 807.316.833	E Penyedia	77

10 Proyek eProc 2016							Potensi Peserta		
NO.	PROJEK	PENYEDIA	KATEGORI	PENGUMUMAN	BLA KONTRAK	IMBU	HPS	X/N	SKOR
1	Pengadaan minibus (termasuk 14 barang ke bawah/complete)	PT HASJRAT ABADI	Pengadaan Barang	24 Oct 2016	2.338.680.900	2.030.600.000	2.030.600.000	100%	18
2	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM	PT. MANGGAP KANA SURYA	Pengadaan Barang	2 Nov 2016	2.275.000.000	2.300.000.000	2.280.800.000	98%	19
3	Pengadaan Acor Laser	PT TRINITY SUKSES	Pengadaan Barang	25 Feb 2016	2.444.420.000	2.500.000.000	2.467.900.000	98%	18
4	Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan Umum (alat Keperawatan Manal)	PT SURABANDI	Pengadaan Barang	4 Nov 2016	2.701.680.900	2.982.000.000	2.878.900.000	94%	18
5	Pengadaan Maki Onas Kepala CARTOL	PT HASJRAT ABADI	Pengadaan Barang	1 Jan 2016	1.342.000.000	1.000.000.000	1.045.800.000	100%	17
6	Pengadaan Pupa NPK Urea Intermixtas Kalsia, Cangkak, dan Pita	CV DARUDA AGRO BENTOSA	Pengadaan Barang	11 Apr 2016	4.978.580.800	5.000.000.000	4.996.750.000	100%	17
7	Pengadaan Slat Kassa Di Wilayah Minahasa Raya	CV BERKUT PRIMA	Pengadaan Barang	11 Apr 2016	1.275.000.000	1.500.000.000	1.288.900.000	98%	17
8	Pengadaan Chalk Penzer dan Coarboximidat	CV REPAIR JEN	Pengadaan Barang	1 Jan 2016	1.888.000.000	1.925.000.000	1.921.721.000	98%	17
9	Pengadaan Pupa NPK urea Intermixtas Tanaman Kakao Di Gales		Pengadaan						

10 Besar Pengadaan paling Beresiko di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2015



pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga”. Kondisi ini diduga terjadi dalam tender minibus itu.

#### Spesifikasi Mengarah ke Satu Merek

Sembilan perusahaan mundur karena menganggap spesifikasi yang ditentukan sudah mengarah pada satu produk perusahaan. Tender ini seperti terjadi main mata. Dengan spesifikasi yang diminta, mobil yang dibutuhkan sudah pasti Toyota Hiace Commuter. Peserta tender lain tidak memiliki mobil berspesifikasi sangat mirip seperti yang diminta panitia lelang.

Spesifikasi itu disebutkan terdiri dari minibus eksekutif mirip dengan apa yang terdapat di mobil minibus Toyota Hiace Commuter. Bahkan, dalam dokumen rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Biro Umum dalam APBD Perubahan 2016, secara terang tertulis minibus Hiace Commuter. Spesifikasi khusus minibus tersebut adalah memiliki kursi sofa kulit untuk 9 penumpang, *climate control*, *real ceiling air conditioner*, *new combination meter*, *seatbelt* di tiga titik. Tercatat pula harus memiliki fasilitas pijat getar disetiap kursi penumpang, kursi penumpang baris pertama bisa diputar menghadap ke belakang. Pada kursi penumpang baris ke dua, sandarannya bisa menjadi

meja. Sementara kursi baris terakhir dapat didorong untuk memperluas bagasi. Ada juga *automatic slinder door*, lampu baca disetiap kursi, mini TV dan kulkas, serta stop kontak listrik 220 volt.

Selain itu, spesifikasi itu juga disebutkan minibus harus dilengkapi *audio video system* yang terpisah antara kabin sopir dan penumpang. Audio video kabin sopir dengan sistem GPS dan memiliki kamera belakang untuk memundurkan mobil. Audio video untuk kabin penumpang terintegrasi dengan sistem karaoke berisi 10 ribu lebih lagu yang berlisensi.

Seluruh spesifikasi yang diminta Biro Umum itu hampir pasti dipenuhi PT Hasjrat Abadi. Dalam dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE), pengadaan minibus berpenumpang maksimal 14 orang itu terdiri dari 2 jenis spesifikasi. Terdiri dari dua unit jenis eksekutif dan satu unit dengan spesifikasi standar. Namun, dalam realialisasi proyek, Biro umum membeli satu unit Toyota Hiace Commuter dan 2 unit Toyota Hiace Commuter Executive dengan modifikasi khusus. Mantan Kepala Biro Umum Sulawesi Utara, Jimmy Ringkuangan, ada 3

minibus yang dibeli. Yaitu satu unit Toyota Hiace Commuter Executive seharga Rp 509 juta, dan dua unit Toyota Hiace Commuter Executive bermodifikasi khusus dengan harga Rp 760 juta perunit. Total seluruhnya mencapai Rp 2.029.000.000. “Satu unit mobil diparkir di belakang kantor gubernur, satu diparkir di bandara dan satu lagi berada di rumah dinas gubernur. Ketiga minibus ini digunakan untuk menjemput tamu,” ujarnya.

#### Perbedaan Realisasi APBD

Sejak awal, ada perbedaan yang mencolok antara APBD Perubahan 2016 dengan realisasi proyek minibus itu. Dokumen Perubahan Anggaran Belanja Langsung Biro Umum dalam APBD Perubahan 2016 disebutkan sebagai belanja modal peralatan dan mesin kendaraan bermotor penumpang (bus eksekutif berpenumpang 30 orang lebih), dan minibus (berpenumpang kurang dari 14 orang) Hiace Commuter. Kenyataannya, Biro Umum menyebutkan tender pembelian satu unit Toyota Hiace Commuter

<b>Nama Paket</b>	<b>Pengadaan minibus (penumpang 14 orang ke bawah/commuter)</b>	<b>Kode Lelang</b>	2909173
<b>Propinsi</b>	Sulawesi Utara	<b>Akhir Lelang</b>	
<b>Kota/kabupaten</b>	Manado (Kota)	<b>Pengumuman</b>	2016-10-24
<b>LPSE</b>	LPSE Provinsi Sulawesi Utara	<b>Tahun Anggaran</b>	2016
<b>SKPD</b>	BIRO UMUM	<b>Kategori</b>	Pengadaan Barang
<b>Agen</b>	-	<b>Sumber Dana</b>	APBD
<b>Panitia</b>	BIROUMUM092016	<b>Pagu</b>	2.030.600.000
<b>Jumlah Peserta</b>	0 / 0	<b>HPS</b>	2.030.600.000
<b>Penyedia</b>	<b>PT. HASJRAT ABADI</b>	<b>Nilai Penawaran</b>	
<b>Direktur</b>		<b>Skor PFA</b>	<b>19</b>
		Partisipasi:	5
		Monopoli:	4
		Nilai:	4
		Efisiensi:	5
		Waktu:	1
<b>NPWP Penyedia</b>	01.306.067.8-092.000	<b>Hasil Lelang</b>	2.030.600.000

Paket Pengadaan Minibus Commuter  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Executive, dan dua unit Toyota Hiace Commuter Executive dengan modifikasi khusus.

Beragam pertanyaan bermunculan. Apakah perbedaan ini lazim? Mantan Kabiro Umum Jimmy Ringkuangan yang kini menjabat Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang Jasa Pemrov Sulawesi Utara, menyebutkan hal itu wajar. Ia menjelaskan ketentuan penganggaran dapat dilakukan pergeseran anggaran sesuai objek kebutuhan. Mekanismenya adalah mengajukan pengusulan pergeseran dengan memperhatikan kebutuhan.

“Kami membutuhkan kendaraan tamu setingkat pejabat negara dan tamu asing. Jadi mengingat kebutuhan tersebut dilakukan pergeseran anggaran. Dari 2 Unit bus menjadi 3 unit Hiace Commuter (2 executive dengan spesifikasi khusus dan 1 unit executive),” ujar Ringkuangan. Usulan sesuai kebutuhan ini diajukan ke Sekretaris Daerah Provinsi Sulut untuk mendapatkan persetujuan. Usulan ini juga diajukan ke Badan Keuangan Pemprov sekaligus menetapkan pergeseran anggaran sesuai porsi yang tersedia. “Tapi pergeseran hanya bisa dilakukan jika dalam satu program. Kami

telah memenuhi semua prosedur yang berlaku di proyek ini,” kata Ringkuangan.

Terkait dengan pergeseran anggaran APBD ini, anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulut Billy Lombok mengatakan bahwa memang menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 154 ayat (1) yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memberi ruang untuk perubahan itu. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, (d) keadaan darurat dan (e) keadaan luar biasa. Pergeseran anggaran memang dimungkinkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1) huruf b yaitu pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1) yang menghalalkan juga pergeseran antar obyek belanja dan jenis belanja dan antar rincian obyek belanja. Selanjutnya, Pasal 160 pun telah

PT. HASJRAT ABADI CABANG TOBELO									
DATA e-PROC 2016: PENYEDIA									
Direktur: - Direktur: ARHAM MUSTAFA, ST Direktur: RULLY LORTOH									
Σ Kontrak	Rp. 6.105.599.000	Σ HPS	Rp. 6.106.200.000						
̄ Kontrak	Rp. 872.228.429	̄ HPS	Rp. 872.314.286						
̄ Kontrak:HPS	100 %	̄ Pagu	Rp. 879.371.429						
Σ Paket	7 Paket	̄ NPWP	Rp. 6.155.600.000						
̄ Triwulan	ke-4	Tahun	01.306.067.5-092.000						
			Semua 2017 2016 2015 2013 2012						
NO.	NAMA PAKET	LPSE	KATEGORI	PENGUMUMAN	BILA KONTRAK	PAGU	HPS	KONTRAK:HPS	SKOR
1.	PENGADAAN MOBIL PATROL (OPERASIONAL POLRES)	LPSE Kabupaten Mahkota Ulu	Pengadaan Barang	8 Oct 2016	468.400.000	500.000.000	468.400.000	100%	16
2.	PENGADAAN 1 UNIT MOBIL TRUK	LPSE Kabupaten Mahkota Ulu	Pengadaan Barang	12 Oct 2016	494.800.000	500.000.000	494.800.000	100%	16
3.	PENGADAAN 1 UNIT MOBIL DUMP TRUCK SAMPAH	LPSE Kabupaten Mahkota Ulu	Pengadaan Barang	12 Oct 2016	391.600.000	400.000.000	391.600.000	100%	16
4.	Pengadaan Mobil Jabatan Keras (DPR)	LPSE Provinsi Sulawesi Utara	Pengadaan Barang	1 Jan 2016	1.045.000.000	1.050.000.000	1.045.000.000	100%	17
5.	Pengadaan Mobil Pelayanan Tamsi VIP	LPSE Provinsi Gorontalo	Pengadaan Barang	31 Aug 2016	800.000.000	800.000.000	800.000.000	100%	16
6.	Pengadaan mobil (pernumpang 14 orang ke bandara/instansi)	LPSE Provinsi Sulawesi Utara	Pengadaan Barang	24 Oct 2016	2.030.600.000	2.030.600.000	2.030.600.000	100%	19
7.	PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL DOKTER AHLI	LPSE Kabupaten Mahkota Ulu	Pengadaan Barang	5 Oct 2016	874.999.000	875.000.000	875.000.000	100%	17

Paket Pengadaan yang Pernah Dimenangkan oleh PT Hasjrat Abadi

memberi dan membatasi kewenangan untuk melakukan pergeseran. Pasal 160 ayat (2), memberi ruang dan membatasi kewenangan untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKAD (pejabat pengelola keuangan daerah).

Maka, kata Billy, bila sesuai dengan aturan dan ternyata tak perlu lagi dibahas di DPRD, maka tindakan tersebut sah. “Namun Biro Umum sebagai ujung tombak bagi sarana dan prasarana pimpinan pemerintahan harus matang dalam perencanaannya. Ke depannya, Biro Umum perlu lebih sigap, perencanaan harus lebih baik

dan memperhitungkan kebutuhan keprotokoleran maupun kebutuhan operasional lainnya,” kata anggota Fraksi Demokrat itu.

#### Motif Pemenang Tender

Praktik monopoli diduga telah berlangsung lama di tiap tender kendaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kecurangan itu pun diduga masih terjadi hingga saat ini, karena kedudukan PT Hasjrat Abadi masih tak terkalahkan sebagai pemenang tender. PT Hasjrat bersama dengan Pemrov Sulut sudah seperti mitra yang tak terpisahkan. Sadar sering menjadi sorotan, manajemen PT Hasjrat mengklaim sudah memperbaiki mekanisme

tender proyek sejak tujuh tahun lalu. Mereka menyebutkan turut memerangi uang komisi di tiap tender. Mereka belajar dari pengalaman, setelah berkali-kali dipanggil kejaksaan terkait dengan dugaan korupsi proses tender kendaraan dinas pemerintah.

PT Hasjrat Abadi adalah *dealer* terbesar di Sulawesi Utara yang memegang distribusi Toyota. Salah seorang *marketing* Toyota, Christian Ferry Taroreh, mengakui proyek pengadaan kendaraan dinas pemerintah daerah adalah bagian dari target penjualan PT Hasjrat Abadi. Untuk memuluskan hal ini, PT Hasjrat Abadi bahkan menempatkan *personal marketing (sales counter)* terbaiknya di setiap unit pemerintahan. Tujuannya, menjalin hubungan baik dan memantau rencana pengadaan kendaraan dinas.

Terkait dengan proyek pengadaan Hiace Commuter di Biro Umum Pemprov Sulut anggaran APBD 2016, awalnya ditangani oleh PT Hasjrat cabang Airmadidi. Saat itu Ferry Taroreh menjabat sebagai Kepala Outlet Toyota, Minahasa Utara. Perusahaan, katanya, menempatkan Fransine sebagai *sales counter* di Pemprov Sulut.

Fransine, katanya, adalah orang selalu mengurus proyek pengadaan kendaraan dinas. Namun Fransine sudah mengundurkan diri, mengikuti suaminya yang bekerja di Palu. Proyek ini kemudian digantikan oleh Ferjie. “Saya sudah tidak begitu mengetahui kelanjutannya karena sebelum realisasi proyek pada September 2016, saya sudah berpindah ke Cabang Toyota di Jalan Tendean,” kata Ferry. Ferjie mengaku tak memahami detail informasi tender itu, misalnya harga penawaran yang disodorkan PT Hasjrat. Ia pun tak mengingat jumlah persis uang yang dibayarkan Pemprov Sulut untuk pengadaan ketiga minibus tersebut. “Harganya Rp 700-an juta. Saya sudah tidak ingat dan semua file-nya sudah saya serahkan kepada pimpinan,” kata Ferjie. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengakui rutinnnya kemenangan yang diraih PT Hasjrat Abadi. Mereka beralasan produk PT Hasjrat selalu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pemerintah disebutkan sudah memberikan kesempatan kepada penyedia lokal, namun mentok di pelayanan *after sale service*. “Perusahaan penyedia lain belum membuka diri untuk menyesuaikan dengan proses tender pemerintah,”

kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulut Conny Tidayoh.

#### **Gudang Data Opentender**

Potensi kecurangan tender ketiga minibus ini sudah terendus sejak awal oleh opentender.net. Situs ini dikelola dan dikembangkan metodenya oleh ICW. Situs ini acapkali mendeteksi berbagai penyimpangan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa yang bersifat elektronik (e-procurement).

“Data pengadaan kini semua terbuka, bisa diakses melalui LPSE. ICW membuat metode ini secara online dengan menghubungkan data pengadaan secara nasional di LKPP pada sistem opentender yang dibuat ICW, sehingga publik bisa akses secara gratis melalui opentender.net,” kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto.

Data yg tersedia di opentender.net, katanya, sudah diolah. Publik bisa langsung memanfaatkannya karena setiap pengadaan yang ada sudah dianalisis risiko berdasarkan indikator penilaian. “*Nah*, karena sifatnya masih potensi risiko maka hasil dari opentender belum disebut sebagai korupsi. Tetapi dengan opentender,

penegak hukum, pengawas internal dan masyarakat bisa menentukan prioritas pengadaan yang paling berisiko untuk diinvestigasi lebih lanjut,” ucap Agus.

“Untuk menguji risiko penyimpangan yang telah didapatkan dari opentender, kata Agus, harus ditelusuri lewat investigasi. Misalnya mencari dan menelusuri data kontrak pengadaan dan rekam jejak perusahaan yang menang dan ikut tender. “Termasuk pengujian di lapangan agar mengetahui apakah proyek fiktif atau bukan,” katanya.

\*\*\*

## Jalan Menuju Juara

- Spesifikasi Pengadaan minibus Commuter di Biro Umum Pemprov Sulawesi Utara sudah mengarah pada fasilitas yang ada di satu merek, yakni minibus Toyota Hiace Commuter.
- 9 perusahaan peserta tender lainnya mundur dan tidak mengirimkan dokumen penawaran karena sudah pasti tak bisa memenuhi spesifikasi mobil yang ditenderkan.
- Dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Pengadaan Minibus berpenumpang maksimal 14 Orang dengan 2 (dua) jenis spesifikasi yakni 2 (dua) unit untuk Jenis Executive dan 1 (satu) unit yang Jenis Standart. Namun, dalam realisasi proyek, Biro umum membeli 1 unit Toyota Hiace Commuter Executive dan 2 unit Toyota Hiace Commuter Executive dengan modifikasi khusus.

## Mewah hingga ke pintu

Fasilitas yang terdapat di minibus Toyota Hiace Commuter milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.



**Mesin pemijat di tiap kursi**



**Televisi**



**Karaoke yang dilengkapi speaker canggih plus 10 ribu lagu berlisensi**



**Kulkas**



**Pengatur suhu di tiap kabin**



**Pintu otomatis**



**Lampu baca di tiap kursi**



**Suspensi canggih**



**Kursi yang mudah digeser**

## Proyek-proyek yang dimenangkan PT Hasjrat Abadi



Pengadaan mobil kepala dinas – Provinsi Gorontalo – November 2012



Pengadaan alat angkutan bermotor sedan – Kota Tomohon – September 2013



Pengadaan kendaraan dinas roda dua- Kabupaten Bolaang Mongondow – Oktober 2013



Pengadaan mobil Ketua DPRD – Provinsi Sulawesi Utara – Juni 2016



Pengadaan mobil pelayanan tamu VIP – Provinsi Gorontalo – Agustus 2016



Pengadaan mobil Patwal (Operasional Polres) – LPSE Halmahera Utara – Oktober 2016



Pengadaan 1 unit mobil tinja – Kabupaten Halmahera Utara – Oktober 2016



Pengadaan 1 unit dump truk sampah – Kabupaten Halmahera Utara – Oktober 2016



Pengadaan minibus – Provinsi Sulawesi Utara – Oktober 2016



Pengadaan mobil jeep Wakil Gubernur – Provinsi Sulawesi Utara – Maret 2017



Showroom Toyota Milik PT. Hasjrat Abadi

## Sulawesi Utara Berawal dari Material Bangunan

***Hampir 90 persen kendaraan dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bermerek Toyota disuplai oleh PT Hasjrat Abadi. Perusahaan ini bahkan unggul di berbagai tender di Indonesia Timur karena memiliki 273 cabang resmi Toyota. Jual-beli mobil bukanlah bisnis awal mereka.***

PT. Hasjrat Abadi adalah perusahaan swasta di Manado, Sulawesi Utara yang bergerak di perdagangan umum. Sebelumnya, perusahaan ini bernama CV Hasjrat Abadi, berdiri 31 Juli 1952 di Jakarta dengan notaris Sie Kwan Djien No. 12 Tahun 1952. Awalnya, perusahaan ini menjual material bangunan berupa semen, besi, tripleks dan lain-lain.

Karena berkembang dengan pesat, CV Hasjrat Abadi berubah menjadi perusahaan perseroan (PT), berdasarkan akte notaris No. 124 Tahun 1956 di Jalan Sisingamangaraja No. 09 Calaca Manado, dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 2 November 1981 No. 5/43/13. Di sanan tercatat dua pendiri, yakni Albert Hendrik Palar atas nama Rakhel David dan Willy Lontoh.

Perusahaan ini kemudian sukses sebagai importir plastik, kaca industri, dan alat beserta hasil pertanian. Selama dua dekade berikutnya, PT Hasjrat mengembangkan usahanya untuk memenuhi peluang dan lini baru di pasar dan membentuk citra bisnis utamanya. Produk-produk yang dipasok selama tahun-tahun awal adalah semen, pintu kayu, alat-alat elektronik, serta kendaraan roda empat.

Pada 1965, PT Hasjrat Abadi menjadi distributor eksklusif sepeda motor Yamaha di Manado. Pasar mereka diperluas sampai ke Maluku dan Papua. Pada 1979, kerjasama dengan Toyota dimulai. Di tahun yang sama, PT Hasjrat mendirikan mitra layanan purna jual, yakni CV Combos di Manado. Pendirian perusahaan ini bertujuan melengkapi fasilitas penjualan. Kini, dengan jumlah staf lebih dari 2.200, PT Hasjrat Abadi memfokuskan bisnisnya dalam penjualan kendaraan, servis, dan pembiayaan.

Kepala Seksi Umum PT Hasjrat Abadi Cabang Manado, Novi Koba, mengatakan saat ini perusahaannya turut menyediakan produk inovasi seperti Yamaha Outboard Motor (motor tempel), distribusi

ban Dunlock, distribusi traktor tangan Yanmar, seng Mitico dan seng Alduron. Produk-produk ini mendampingi penjualan utama mereka, yakni produk-produk merk Toyota dan Yamaha.

Mereka juga memiliki PT Hasjrat Multifinance (HMF) yang mengurus pembiayaan produk-produk PT Hasjrat. HMF juga melayani jasa pemberian saran sampai pada analisa spesifik pembiayaan setiap produk, serta paket kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang akan melakukan pembelian kendaraan secara efisien dan mudah. "HMF mulai beroperasi pada 1995, dan membuka kantor di hampir semua *outlet* penjualan kami," kata Novi.

Dilihat dari kegiatannya, kantor PT Hasjrat Abadi di Manado merupakan cabang terbesar. Itu sebabnya PT Hasjrat Abadi cabang Manado merupakan induk dari hampir seluruh kantor cabang di Indonesia Timur. PT Hasjrat Abadi juga mempunyai beberapa anak perusahaan, antara lain PT Perkonsuma yang bergerak di bidang Kontraktor, CV Combos yang bergerak di bidang service mobil, PT. Samudera Purnablie Abadi yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan, CV. Yosparine, CV Harpa,

CV Autonusa, CV Hasjrat Multifinance dan PT Mauru Permata Abadi.

### **Tender Kendaraan Dinas**

Tender kendaraan dinas pemerintah merupakan salah satu target penjualan PT Hasjrat, khususnya dengan merek Toyota. Untuk memuluskan target ini, manajemen PT Hasjrat Abadi terus melakukan terobosan sebagai distributor eksklusif Toyota dan Yamaha, di sebelas provinsi kawasan Indonesia bagian Tengah dan Timur, termasuk Provinsi Sulawesi Utara.

Pelayanan yang prima melalui perawatan purnajual, pemeriksaan kendaraan bermotor, *tune up*, dan pemeliharaan kendaraan pelanggan menjadi fokus utama bisnis mereka. Mekanik yang terlatih sesuai dengan standar Toyota dan Yamaha, dengan bengkel khusus dilengkapi untuk melayani konsumen secara komputerisasi. Mereka juga selalu mempergunakan suku cadang Toyota dan Yamaha asli, dan menjamin ketersediaan, serta ketepatan waktu pengiriman suku cadang.

“PT Hasjrat Abadi ahli dalam semua produknya mengikuti standar Toyota dan Yamaha, sehingga memungkinkan mereka untuk merespons kebutuhan

pelanggan secara cepat dan akurat. Fasilitas penjualan dan *service* terpadu kami adalah modern, dengan akses ke lokakarya berteknologi tinggi,” kata Christian Ferry Taroreh, staf *marketing Showroom* Toyota Cabang Tendeand. Mereka juga mengklaim sebagai yang terbaik. “Ini yang menyebabkan hampir dalam setiap tender kendaraan dinas di pemerintah dimenangkan oleh PT Hasjrat Abadi. Bagi kami untuk pelanggan, proses memilih dan membeli adalah bagian yang menyenangkan dengan menawarkan layanan yang cepat, pilihan pembiayaan disesuaikan, harga yang kompetitif sesuai kebutuhan pelanggan,” Ferry menambahkan. Pada 2016, PT Hasjrat Abadi memenangi tender mobil dinas Ketua DPRD Sulawesi Utara dan pengadaan 3 unit minibus Hiace comutter. Pada 2017 ini, mereka berhasil memenangi tender mobil dinas Wakil Gubernur Sulut. Di perhelatan tender kendaraan dinas se-Indonesia Timur, PT Hasjrat Abadi juga tak terkalahkan. Seperti di Halmahera Utara, Gorontalo, Tobelo, Papua dan provinsi lainnya.

### **Juara Layanan Purnajual**

Ketua Indonesian Offroad Federation (IOF) Sulawesi Utara, Harley Alfredo Benfica Mangindaan, menceritakan pengalamannya terkait dengan

kendaraan dinas saat menjabat sebagai Wakil Walikota Manado periode 2010-2015. “Saya ingin mobil dinas Jeep Rubicon, tapi tidak bisa karena memang saat itu Pemerintah Kota Manado sudah menyiapkan mobil merek Toyota. Alasan mereka, Toyota telah memenuhi semua standar pengadaan proyek kendaraan dinas,” kata pria yang akrab disapa Ai itu.

Bagi Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulawesi Utara ini, tingkat kenyamanan dan kepuasan menggunakan Toyota sebenarnya biasa-biasa saja, mau tak mau harus dipakai. Mobil-mobil dinas itu sudah dianggarkan dan semua prosesnya diserahkan pada instansi terkait. “Dari pengamatan saya, Toyota itu berada pada kelas menengah, dan sebenarnya dari harganya sama dengan merek lain yang kelas premium juga. Tapi sayang, merek ini kurang dipakai oleh pejabat,” kata Ai. Ia melanjutkan, proyek pengadaan mobil dinas tidak hanya melihat dari sisi kenyamanan kendaraan.

Tiap tender juga harus menilik dari kesiapan fasilitas purnajualnya. Soal agen tunggal pemegang merek (ATPM) memiliki infrastruktur yang mumpuni di Sulawesi Utara. Terkait

dengan ini, Ai menganggap Toyota adalah yang terbaik.

“Selain itu, keseragaman dari seluruh daerah (Kabupaten dan Kota) juga berpengaruh bagi panitia tender. Kok di daerah ini ada merek lain yang menang. Padahal sudah teropini merek Toyota yang terbaik saat ini. Nanti akan berpengaruh pada pemeriksaan BPK,” kata pria pengagum mobil jenis jeep ini.

Kecintaan mereka terhadap Toyota juga sudah berjalan sejak lama. Gubernur Sulawesi Utara saat masih dijabat E.E. Mangindaan pada periode 1995-2000, mobil dinas di Pemprov Sulut tak hanya merek Toyota, tetapi ada Suzuki, Daihatsu dan lainnya. “Tapi gubernurnya tetap pake merek Toyota. Saat Gubernur berikutnya juga menggunakan Toyota,” ujarnya.

\*\*\*



**Seplin Bachrir**

**Tempat/ Tanggal Lahir :** Kolaka, 5 September 1989

**Email:** seplinbachrir@gmail.com

**Riwayat Pekerjaan:**

1. Reporter Harian Rakyat Sultra (Kendari Ekspres) Kota Kendari (2013-sekarang)
2. Jurnalis Harian Media Sultra, Kota Kendari, Provinsi Sultra (2012)



**Jeane Bernetje Rondonuwu**

**Tempat/ Tanggal Lahir:** Lembean, 05 Agustus 1974

**Email:** rnetje@yahoo.com

**Riwayat pekerjaan:**

1. Pemred Media Online sulutdaily.com (2012-sekarang)
2. Wartawan Media Online IdManado.com (2011-2012)
3. Wartawan Harian Manado Post ( Th.1998 – 2000 )
4. Kepala Perwakilan Harian Komentar Jakarta (Th.2003 – 2005)
5. Redaktur Wartawan Harian Komentar (Th.2001 – 2005 )



**Muhammad Yunus**

**Tempat, tanggal lahir:** Oesapa, 20 Mei 1984

**Email:** yunuzmuhammad@gmail.com

**Riwayat pekerjaan:**

1. Editor Makassar Terkini (2016 – Sekarang)
2. Kontributor Tempo (2011-2016)
3. Produser program berita CELEBESTV ( 2011 )
4. Video Journalist (VJ) Metro TV (2008 – 2011)
5. Staf Produksi Program Discover Indonesia Metro TV (Februari – April 2011)
6. Litbang Riset dan Polling Penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanuddin (2007-2008)
7. Redaktur Penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanuddin ( 2006 – 2007 )
8. Reporter Penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanuddin ( 2004 – 2006 )



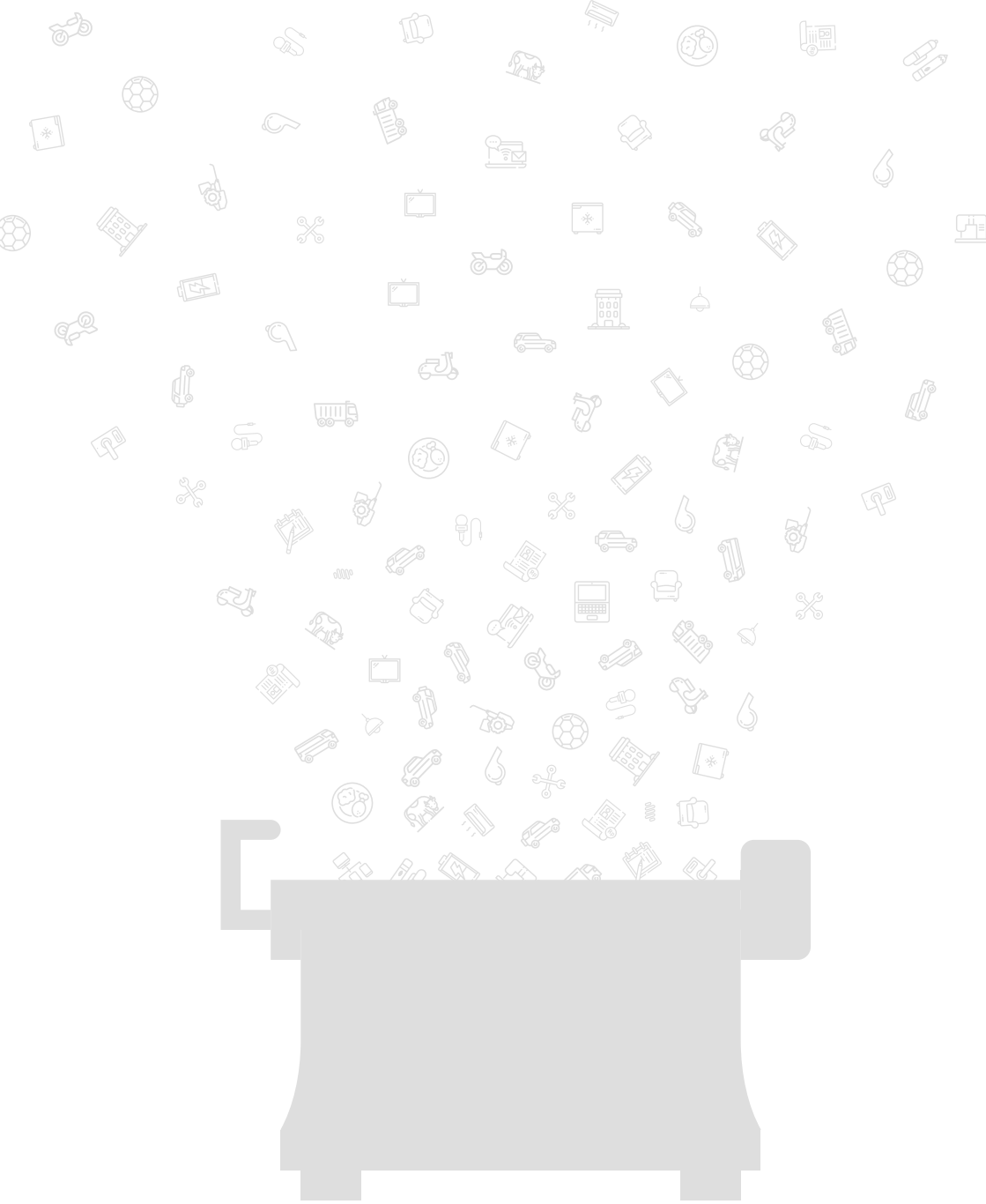
**Aqilah Nurul Khaerani Latif**

**Tempat/ Tanggal Lahir :** Jakarta, 2 April 1994

**Email:** aqilahnkl.job@gmail.com

**Riwayat pekerjaan:**

1. Jurnalis Harian Fajar, 2015 – sekarang





Dari hasil investigasi para jurnalis peserta fellowship, ‘permainan’ lelang secara elektronik dapat ditemukan dengan gampang. Temuan mereka itu sekaligus mengkonfirmasi validitas dari instrument opentender.net yang telah dibuat oleh ICW dalam rangka membantu masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja pemerintah, khususnya di sektor belanja publik. Selain jurnalis, kalangan CSO di daerah, kelompok mahasiswa, peneliti dan masyarakat umum merupakan aktor yang dapat menggunakan tool opentender.net untuk memulai kerja pengawasan karena mudahnya penggunaan tool ini.

Adnan Topan Husodo  
Koordinator ICW

